

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DALAM MENAGGULANGI PENDIDIKAN ANAK PUTUS SEKOLA DI
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



**ANITA WINDA SIWI
NPM. 157310595**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Anita Winda Siwi
Npm : 157310595
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Kampar.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah penulisan Skripsi ini telah susun sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu semoga dapat di setujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah.

Pekanbaru ,15 Desember 2020

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing

Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Rizky Setiawan, S.IP.,M,Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Anita Winda Siwi
Npm : 157310595
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Kampar

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan Dinilai Relatif telah memenuhi Ketentuan- Ketentuan metode penelitian ilmiah, Oleh Karena itu Tim Penguji Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial da Ilmu Politik, dapat menyetujui dan menerimanya untuk salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana

Pekanbaru ,15 Desember 2020

Ketua,

Sekretaris,

Rizky Setiawan, S.IP.,M,Si

Nina Yuslaini S.Ip,M.Si

Anggota

Andriyus S.sos.,M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan 1

Indra Safri, S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anita Winda Siwi
Npm : 157310595
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar
dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah
Di Kabupaten Kampar

Naskah Skripsi ini benar-benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan TIM Penguji dan dinilai telah memenuhi Persyaratan Administrasi dan Akademis, Oleh karena itu dapat di syahkan sebagai sebuah karya ilmiah

Ketua, Pekanbaru, 15 Desember 2020
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si

Nina Yuslimi S.IP.,M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan 1

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Dr.Ranggi Ade Febrian,S.IP.,M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya tahap pertama karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kampar.” penulis telah menulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis sadar dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran dan bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Tidak lupa ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan sumbangsih dalam proses penyusunan Skripsi,yakni

1. Bapak prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, M, C. L selaku rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Rizky Setiawan S.IP.,M.Si selaku dosen pembimbing tunggal yang tak henti – hentinya dengan sabar dan telah membantu mengarahkan serta memberikan motivasi sehingga penulisan Skripsi dapat diselesaikan pada waktunya.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff tata usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau.
6. Terimakasih kepada sahabat yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini serta teman- teman seperjuangan.

Sehingga bimbingan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan jadi amal kebaikan. Terimakasih.

Pekanbaru ,15 Desember 2020

Penulis

Anita Winda Siwi

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
SURAT PERNYATAAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	21
1. Konsep Pemerintah	21
2. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	25
3. Konsep Pemerintah Daerah	26
4. Konsep Kebijakan	28
5. Konsep Evaluasi.....	30
6. Konsep Pelaksanaan.....	32
7. Konsep Sanggar Kegiatan Belajar	35
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Pikir	39
D. Konsep Operasional	40
E. Operasionalisasi Variabel	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan dan Key informan	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Jadwal Penelitian	48
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	49

BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar	51
1. Kondisi Geografis	52
2. Keadaan Demografi.....	54
B. Gambaran Umum Kabupaten Kampar	56
C. Visi misi Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar	57
D. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten kampar	58
E. Deskripsi UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar	66
F. Profil UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar	67
G. Visi Misi UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar	67

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas informan	69
1. Jenis Kelamin	69
2. Pendidikan	70
3. Umur	71
B. Hasil dan Pembahasan.....	72
1. Efektifitas	74
a. Adanya sosialisasi Kepada Masyarakat	74
b. Adanya Pembinaan	76
2. Efisiensi	77
a. Adanya Penyuluhan	78
b. Adanya kerja sama dengan masyarakat	80
3. Kecukupan	81
a. Adanya masyarakat yang tertinggal dalam program ini ...	82
b. Ketersediaan tenaga penyuluhan	83
4. Pemerataan	85
a. Adanya tim pengawas dalam Pelaksanaan Program SKB	85
b. Adanya sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan SKB	87
5. Responsifitas	88
a. Pelaksanaan SKB berjalan dengan baik	88
6. Ketepatan	90
a. Pelaksanaan Program SKB sesuai dengan aturan yang ada	90
b. Pelaksanaa Prgotam SKB berjalan sesuai dengan sasaran.....	92
C. Faktor Penghambat	94

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	98
-------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Data Anak Putus Sekolah Di Provinsi Riau 2017	11
I.2	Daftar Warga Belajar di SKB Kabupaten Kampar	12
I.3	Jadwal Pelajaran di UPT SKB Kabupaten Kampar	12
I.4	Sarana dan Prasarana SKB Kabupaten Kampar	17
I.5	Sarana dan Prasarana yang rusak di SKB Kabupaten Kampar	18
II.1	Penelitian Terdahulu.....	37
II.2	Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kampar.....	42
III.1	Informan Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kampar.....	45
III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kampar.....	48
VI.1	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan kepadatan penduduk menurut kecamatan tahun 2019	55
V.1	Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	69
V.2	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	70
V.3	Identitas Informan Berdasarkan Umur	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Fikir Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam menanggulangi Pendidikan anak Putus sekolah di Kabupaten Kampar	39



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Wawancara Penelitian	100
Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan FISIPOL UIR tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa	104
Lampiran 3 Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	105
Lampiran 4 Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan	106
Lampiran 5 Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar	107
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian.....	108

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang BertandaTangan dibawah ini :

Nama : Anita Winda Siwi
Npm : 157310595
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
JenjangPendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekatnya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetap kan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian koprohensif yang telah saya ikuti serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum Negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buatdengan penuh kesadaran dan tanpat tekanan dari pihak mana pun juga.

Pernyataan

Anita Winda Siwi

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR DALAM MENANGGULANGI PENDIDIKAN ANAK PUTUS
SEKOLAH DI KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

Anita Winda Siwi

Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kampar . Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan teknik analisis Deskriptif , Penulisan ini menggambarkan kondisi secara objek yang di temukan di lapangan berdasarkan data-data di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar berkaitan dengan menanggulangi Pendidikan Anak Putus sekolah di Kabupaten Kampar , dengan wawancara dan observasi sebagai alat pengumpulan data , dan data yang di kumpulkan kemudian di sajikan sebagai bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan Objektivitas keberadaan dan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti terdapat 10 kelompok menjadi objek penelitian. Penulisan terdiri dari data primer yang sama diperoleh melalui alat penelitian berupa wawancara dan observasi dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara sesuai dengan hasil penelitian memperoleh kesimpulan yaitu dalam Evaluasi pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kampar dikategorikan Kurang baik dimana dalam pelaksanaan Program sanggar kegiatan belajar ini masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam proses belajar mengajar seperti kurangnya ruang kelas belajar serta fasilitas belajar lainnya yang perlu di tambah.

Kata Kunci : Evaluasi, Program , Sanggar Kegiatan Belajar, Pendidikan, Anak Putus sekolah

EVALUATION OF SANGGAR PROGRAM IMPLEMENTATION OF LEARNING ACTIVITIES IN RESPONDING THE EDUCATION OF SCHOOLS TO DECIDE SCHOOLS IN KAMPAR REGENCY

ABSTRACT

Anita Winda Siwi

The purpose of this study is to describe the Evaluation of the Implementation of the Learning Activities Studio Program in Tackling Education of School Drop Outs in Kampar District. The method used in this study is a qualitative method with descriptive analysis techniques, this writing describes the condition of objects that are found in the field based on data in the field relating to the problem of evaluating the implementation of the Studio Learning Program Studio in Kampar District relating to tackling Children's Education School dropouts in Kampar District, with interviews and observations as data collection tools, and the data collected are then presented as the main raw material for analyzing empirical conditions and the objectivity of the existence and purpose of research at the locations in which there are 10 groups of research objects. Writing consists of the same primary data obtained through research tools in the form of interviews and observations and secondary data obtained from interviews in accordance with the results of the study obtained conclusions, namely in the evaluation of the implementation of the Learning Activity Studio Program in Tackling School Drop Out Education in Kampar District categorized as Not good where in the implementation of the Studio program this learning activity there are still some inadequate facilities and infrastructure in the teaching and learning process such as the lack of classrooms and other learning facilities that need to be added.

Keywords : Evaluations, Programs, Learning Activities Centers, Education, School Drop Outs

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Negara merupakan salah satu jawaban dari berbagai permasalahan yang salah satunya pengakuan bahwa ini adalah satu negara yang terdapat unit atau organisasi serta kebijakan pemerintah untuk pengatur berbagai masalah-masalah antara individu dengan individu, individu dengan kelompok yang sangat kompleks, dan dengan adanya Negara diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih antar kepentingan, namun dengan banyaknya kepentingan antara individu dan kelompok tersebut maka tidak semuanya terakomodir secara keseluruhan oleh Negara dan disinilah muncul berbagai permasalahan didalam masyarakat.

Urusan pemerintahan menurut Pasal 9 terbagi atas urusan pemerintahan *absolut*, urusan pemerintahan *konkruen* dan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu: Urusan pemerintahan *absolute* adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, antara lain:

- a. politik luar negeri
- b. pertahanan;
- c. keamanan
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama

Sedangkan urusan pemerintahan *konkruen* merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara urusan pemerintahan pusat, urusan pemerintahan daerah provinsi dan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Dan dialam ayat (2) yang berbunyi: Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkunganhidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembagian urusan pemerintahan terdiri atas urusan Absolut, urusan Konkuren, dan umum, dalam penelitian ini peneliti berfokus ada urusan konkuren yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yaitu berkaitan dengan Pendidikan .

Kabupaten kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki Luas kurang lebih 10.963 km². Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan , kemiskinan merupakan permasalahan yang terjadi di belahan dunia dengan tingkat kompleksitas yang berbeda-beda .

Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Riau Jumlah penduduk Miskin di Kabupaten Kampar pada tahun 2018 sebesar 62.343 jiwa. Kemiskinan ini lah menjadi salah satu faktor penyebab anak-anak putus sekolah dalam hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah anak putus sekolah ini melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Mencetak sumber daya manusia yang handal adalah persyaratan mutlak bagi kemajuan suatu bangsa. Sumber daya manusia yang handal diharapkan dapat menjadi agen-agen pemabangunan yang dapat mengurai jerat kemiskinan di Indonesia. Pada zaman yang semakin maju menuntut masyarakat untuk terus berubah mengikuti perkembangan global. Kemajuan ilmu teknologi mempengaruhi perubahan-perubahan diberbagai bidang kehidupan sosial , ekonomi, budaya, pendidikan dan teknologi yang lain. Pendidikan menjadikan hal lain penting bagi masyarakat, karena dengan pedidikan masyarakat akan mampu mengikuti setiap perubahan-perubahan berbagai bidang kehidupan baik politik, sosial, maupun teknologi. Kemampuan masyarakat untuk mengikuti setiap perubahan tersebut akan mepengaruhi masyarakat untuk bisa berkembang lebih mandiri , lepas dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Untuk itu perlu ada pembenahan atau tindakan dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Pendidikan diharapkan dapat semakin berkembang dangan semakin baiknya kualitas dan kuantitas pendidikan sehingga semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang bermutu. Dengan semakin berkembangnya

dunia pendidikan diskriminasi juga semakin berkurang. Namun sayangnya akses pendidikan belum sepenuhnya diterima masyarakat, khususnya masyarakat yang tertinggal di daerah terpencil terutama di daerah-daerah tertinggal. Banyak dari masyarakat di daerah terpencil belum mendapatkan akses pendidikan sehingga berdampak pada pola pikir yang tertinggal dan kebodohan yang akhirnya kembali menyebabkan kemiskinan. Belum terjangkaunya pendidikan oleh masyarakat miskin mengakibatkan banyaknya anak-anak tidak sekolah, dan tingginya kasus putus sekolah yang akhirnya menimbulkan masalah baru seperti meningkatnya pengangguran. Meskipun saat ini pemerintah sudah menggalakan wajib belajar 12 tahun, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat di daerah terpencil dan miskin belum tersentuh pendidikan,

Untuk Pertama kalinya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berdiri tanggal 23 juni 1978 SKB berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 206/O/1978 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar , Namun saat itu belum ada pamong belajar dalam struktur Organisasi SKB. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut terbentuk 151 SKB yang tersebar di kabupaten/Kota di 25 provinsi. SKB dibentuk dengan mengalihkan fungsi Kursus Penelitian (PLPM) dan Pusat Pembinaan Aktivitas Generasi Muda (PPAGM), tugas SKB pada awal pembentukannya adalah melaksanakan program kegiatan belajar luar sekolah dan olah raga untuk pamong pendidikan luar sekolah dan instruktur olah raga. Jadi pada awalnya dibentuk SKB belum menyelenggarakan layanan satuan pendidikan luar sekolah, namun untuk melakukan kegiatan pelatihan bagi pamong pendidikan luar

sekolah dan instruktur olah raga. menariknya ada sebutan pamong luar sekolah, bukan pamong belajar. pada awal mulanya Pamong Luar sekolah digunakan untuk menyebutkan pendidik dan tenaga kependidikan kelompok belajar seperti Paket A maupun proram pemberantasan buta huruf.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman ahli Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal, di sebutkkan bahwa Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB adalah Unit pelaksana teknis daerah Kabupaten/kota . Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten/kota. Untuk di Kabupaten Kampar melalui Peraturan Bupati Kampar Nomor 88 tahun 2016 tentang Pembentukan unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar tertera pada Bab 2 tentang Kedudukan dan susunan Organisasi pada Pasal 2 ayat 1 “Satuan Pendidikan Non Formal adalah Pelaksana Kegiata pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan olahragayang berkedudukan di Kabupaten Kampar . pada ayat 2 : Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar. Terkait dengan pembiayaan yang dilakukan pemerintah pusat untuk Sanggar Kegiata Belajar sesuai dengan peraturan Direktur Jendral pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk teknis bantuan sarana Sanggar Kegiatan Belajar Tahun

2018 mengalokasikan dana bantuan sarana SKB sebesar Rp. 7.875.000.000 (Tujuh Milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jumlah sasaran sebanyak 75 SPNF-SKB kemudian dengan satuan Biaya Rp. 105.000.000 untuk setiap satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)/ Sanggar kegiatan Belajar. Pendanaan yang di berikan telah di sesuai kan dengan Kebutuhan sarana dan Prasarana setiap SPNF-SKB yang ada, terkait dengan Pelaksanaan Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kampar ini dari hasil observasi peneliti melihat sarana dalam pelaksanaan SKB di Kabupaten Kampar ini dinilai masih Kurang.

Penjenjangan pendidikan kesetaraan tidak menggunakan kelas, tetapi menggunakan tingkatan atau derajat kompetensi. Adapun tingkatan dan derajat kompetensi pendidikan kesetaraan diatur sebagai berikut:

- Program Paket A setara SD terdiri dari dua tingkatan, yaitu Tingkatan 1 setara Kelas I-III/derajat kompetensi Awal dan Tingkatan 2 setara Kelas IV-VI/derajat kompetensi Dasar.
- Program Paket B setara SMP terdiri dari dua tingkatan, yaitu Tingkatan 3 setara Kelas VII-VIII/derajat kompetensi Terampil 1 dan Tingkatan 4 setara Kelas IX/derajat kompetensi Terampil 2.
- Program Paket C setara SMA terdiri dari dua tingkatan, yaitu Tingkatan 5 setara Kelas X/derajat kompetensi Mahir 1 dan Tingkatan 5 setara Kelas XI-XII/derajat kompetensi Mahir 2.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Program Paket A, B dan Paket C, dinyatakan bahwa Program Paket A Tingkatan

1/Awal (Setara Kelas I-III) bahwa lama pembelajaran pada Tingkatan 1 adalah 6 semester, sama dengan 6 (enam) semester atau tiga tahun. Program Paket A Tingkatan 2/Dasar (Setara Kelas IV-VI) mempunyai Lama pembelajaran pada Tingkatan 2 adalah enam semester (3 tahun). Dengan demikian Program Paket A setara SD secara keseluruhan ditempuh selama 6 tahun.

Program Paket B Tingkatan 3/Terampil 1 (Setara Kelas VII – VIII) dapat disimpulkan bahwa lama pembelajaran pada Tingkatan 3 adalah 4 semester, sama dengan 4 (empat) Tahun. Sedangkan Paket B Tingkatan 4/Terampil 2 (Setara Kelas IX) Artinya lama pembelajaran pada Tingkatan 4 adalah dua semester. Di sinilah menjawab pertanyaan berapa lama pembelajaran Paket B dilaksanakan, yaitu enam semester atau tiga tahun. Bukan dua tahun karena hanya terdiri dari dua tingkatan.

Program Paket C (IPA/IPS) Tingkatan 5/Mahir 1 (Setara Kelas X) Lama pembelajaran pada Tingkatan 5 adalah 2 semester, Program Paket C (IPA/IPS) Tingkatan 6/Mahir 2. Disimpulkan lama pembelajaran pada Tingkatan 6 adalah empat semester,. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Paket C diselesaikan dalam jangka waktu enam semester atau tiga tahun.

Program-program Pendidikan Non Formal yang ada di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) adalah program PAUD , pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C, serta berbagai program kecakapan hidup untuk membekali peserta didik dengan keterampilan yang “layak jual” (*marketable*). Disamping itu, SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) bisa melakukan penyuluhan untuk menyadarkan

bahaya merokok hingga bahaya narkoba, HIV/ AIDS, Flu burung, Trafficking, bahaya Seks bebas dan tentang kesadaran akan bahaya resiko bencana dan masalah kemasyarakatan yang semakin kompleks pun bisa menjadi bahan pembelajaran yang dikemas sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh peserta didik yang tergabung dalam kelompok belajar. Semuanya ini diprogramkan dalam rangka untuk pembelajaran kaum tertinggal sehingga terbebas dari ketidak tahuan, dan untuk pembelajaran kaum tersingkir sehingga terbebas dari keterpinggiran dan ketidakberdayaan (Ditdikmas, 2009).

Pelaksanaan program SKB (sanggar Kegiatan Belajar) tersebut diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menanggulangi pendidikan anak putus sekolah. Seperti masalah yang masih terjadi seperti Permasalahan yang berkaitan dengan warga belajar adalah lokasi tempat tinggal warga belajar saling berjauhan sehingga sulit mendapatkan satu kelompok sebanyak 40 orang warga belajar, walaupun terdapat juga PKBM di beberapa daerah di Kabupaten Kampar, PKBM itu sendiri berarti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan. PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar, di Kabupaten Kampar sendiri terdapat 13 PKBM. Latar belakang sosial ekonomi warga belajar lemah sehingga frekuensi kehadirannya sangat rendah, Warga belajar menjadi pencari nafkah keluarga, mereka hanya belajar kalau waktu mengizinkan, motivasi belajar rendah, mereka berpendapat tanpa belajarpun

mereka sudah mendapatkan uang, sehingga masih banyak angka putus sekolah di Kabupaten Kampar ini.

Kemudian permasalahan yang berkaitan dengan pamong belajar adalah sulit mendapatkan tutor yang memiliki latar belakang keguruan, khususnya tutor IPA dan Bahasa Inggris, usaha peningkatan kemampuan pamong belajar tidak merata, masih ada pamong belajar yang tidak pernah ditatar atau mendapatkan pelatihan dan tempat tinggal pamong belajar jauh dari SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) sehingga pamong sering tidak datang dalam proses belajar.

Setelah itu permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana adalah lokasi gedung SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) jauh dari tempat tinggal warga belajar, dan fasilitas belajar kurang memadai, jumlah modul terbatas, yaitu 1 modul untuk 3 orang warga belajar, yang seharusnya 1 modul untuk tiap warga belajar, akibatnya mereka sukar untuk dapat melaksanakan proses belajar mandiri, terbatasnya jumlah buku yang dapat menambah wawasan warga belajar, kurang dimanfaatkannya sarana belajar lokal atau yang tersedia di lokasi kegiatan. Berdasarkan fenomena di atas, pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kampar perlu dikaji secara ilmiah melalui penelitian yang berjudul Evaluasi Program SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Kabupaten Kampar dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah.

Tabel I.1 Data Anak Putus Sekolah Di Provinsi Riau 2017

NO	Nama Kabupaten	SD	SMP	SMA	Jumlah
1	Kampar	87	42	45	174
2	Inhil	48	33	32	113
3	Inhu	43	34	43	120
4	Bengkalis	47	54	53	154
5	Rohil	30	22	23	105
6	Rohul	33	23	33	89
7	Pelalawan	32	33	42	107
8	Siak	25	23	15	63
9	Pekanbaru	12	10	11	33
10	Dumai	25	33	29	87
11	Kuantan Singingi	34	25	21	80
12	Kepulauan meranti	34	31	30	95
JUMLAH					912

Sumber Data Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2017

Data diatas menampilkan Jumlah dari anak putus sekolah yang ada di provinsi riau, Anak Putus Sekolah ini di nilai karena oleh beberapa faktor dari hasil pemaparan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Bahwa hal ini selain di pengaruhi oleh faktor Ekonomi namun juga kerana faktor lingkungan sekeliling yang tidak mendukung selain itu kurangnya kontrol dan penerapan sistem pendidikan berkarakter bagi anak-anak usia sekolah. Ditambah masyarakat lingkungan masih sering tidak peduli dengan kondisi pendidikan di sekitarnya, kemudian dalam penelitian ini peneliti berfokus pada Anak usia putus sekolah di Kabupaten Kampar dari data diatas Kabupaten Kampar Merupakan salah satu kabupaten dengan Tingkat Anak Putus Sekolah yang tinggi dengan jumlah 174 orang

Tabel I.2 : Daftar Warga Belajar di SKB Kabupaten Kampar

NO	Paket	Kelas			Jumlah
		1	2	3	
	PAKET A	1	-	-	1
	PAKET B	18	7	75	100
	PAKET C	15	20	114	151
JUMLAH					252

Sumber data UPT SKB Kabupaten Kampar

Pada tabel di atas dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 paket yang terdapat di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar terdiri dari Paket A, Paket B dan Paket C, Untuk Paket A hanya ada 1 warga belajar kemudian pada paket B ada 3 Kelas Belajar pada Kelas 1 terdiri dari 18 warga belajar kemudian pada kelas ke 2 terdapat 7 warga belajar dan kelas 3 ada 75 warga belajar. Setelah itu pada Paket C atau setara SMA sederajat juga terdapat 3 kelas yang terbagi Kelas Pertama terdiri dari 15 orang warga belajar ,kemudian pada Kelas Kedua terdapat 20 Orang Warga Belajar dan pada kelas ke tiga terdapat 114 orang warga belajar dengan keseluruhan warga belajar yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar yaitu sebanyak 252 warga belajar .Pada SKB Kabupaten Kampar di dominasi warga belajar Paket C.

Tabel I.3 Jadwal Pelajaran UPT SKB Kabupaten Kampar

No	Pukul	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
1	07.30-08.00	Upacara	Pkn	Pkn	Mtk
2	08.00-09.00	Pkn	Mtk	B.indonesia	P.agama
3	09.00-10.00	B.indonesia	Penjas	Sejarah	B.indonesia
	10.00-10.10	Istirahat			
4	10.10-11.10	P. agama	Ml	Fisika	Ipa
5	11-10-12.10	Seni budaya	Ips	Seni budaya	Ml
	12.10-12.20	Istirahat			
6	12.20-13.20	Kf	B.inggris	Mtk	Sosiologi
7	13.20-14.20	Pkp		Ips	Ekonomi

Sumber Data UPT SKB Kabupaten Kampar 2020

Kita ketahui pada tabel diatas bahwa pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar melaksanakan proses belajar mengajar selama 4 hari dari Hari senin hingga hari Kamis terdapat 15 mata pelajaran yang diberikan kepada Warga belajar di SKB Kabupaten Kampar, yang dilaksanakan dengan 5 ruang kelas belajar yang ada , untuk setiap paket terdapat 3 kelas seperti pada Paket C dengan jumlah warga belajar 114 orang di bagi kedalam 5 kelas, namun 2 kelas rusak dan tidak dapat di gunakan sehingga hanya 3 kelas yang bisa di gunakan yang mengakibatkan jumlah warga belajar di satu kelas bertambah dan membuat ruang kelas tersebut menjadi penuh dengan 1 kelasnya 38 warga belajar. Untuk menyelesaikan masalah pendidikan Anak Putus Sekolah Maka Pemerintah menetapkan tiga jalur pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”. Sedangkan Untuk menaggulangi anak putus sekolah adalah pendidikan non formal menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional “Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang”. Pengertian pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan dikeluarga taupun lingkungan. Ketiga jalur pendidikan tersebut dibentuk untuk saling melengkapi guna mendukung peningkatan kualitas masyarakat dan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pembagian jenis-jenis pendidikan berdasarkan pembagian tersebut, di pandang perlu oleh pemerintah untuk mendirikan Pendidikan Non Formal (PNF) merupakan jalur pendidikan diluar jalur yang dilaksanakan sebagai salah satu implementasi dari pendidikan sepanjang hayat, Satuan Pendidikan Non Formal selanjutnya disingkat satuan PNF adalah proses belajar terjadi secara teroganisasikan di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal, baik dilaksanakan terpisah maupun merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih besar yang dimaksudkan untuk melayani sasaran didik tertentu dan belajarnya tertentu pula (Marzuki 2012:136)

Inilah salah satu program pemerintah untuk menanggulangi pendidikan anak putus sekolah. Berbeda dengan pendidikan formal yang terbatas pada umur, pendidikan non formal tidak terbatas pada umur, untuk itu bagi anak putus sekolah bisa melanjutkan pendidikannya pada SKB artinya siapapun dapat mendapatkan pembelajaran. Pendidikan nonformal dapat ditempuh dari mulai usia anak-anak hingga lanjut usia sehingga pendidikan non formal memperluas kesempatan bagi orang-orang yang tidak terjangkau pendidikan formal. Maka pemerintah pendidikan non formal atau SKB sebagai salah satu bentuk intansi pemerintahan untuk menanggulangi anak putus sekolah melalui Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Salah satu lembaga pemerintah yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan non formal saat ini adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Sebelumnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 023/O/1997 menyebutkan bahwa “Tugas pokok Sanggar

Kegiatan Belajar yakni melaksanakan pemuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga berdasarkan kebijakan teknis Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga”. Dari Surat Keputusan tersebut dapat diartikan bahwa sebelumnya tugas pokok Sanggar Kegiatan Belajar melaksanakan program-program percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan non formal, sesuai dengan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah maka peran dan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berubah sesuai dengan karakteristik dan kebijakan pemerintah Kabupaten atau kota masing-masing. Sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan non formal, Sanggar Kegiatan Belajar diharapkan mampu mengakses banyak program pendidikan non formal, Sanggar Kegiatan Belajar memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi keterbatasan yang dimiliki Sanggar Kegiatan Belajar menyebabkan lembaga tidak dapat sepenuhnya melaksanakan tugas maupun fungsinya.

Pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pembentukan Teknis Dinas Satuan Kegiatan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar meliputi:

Pada Pasal 1 Ayat (12) meliputi satuan Pendidikan Non Formal selanjutnya disingkat satuan PNF adalah Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kampar. Pada Pasal 1 Ayat (13) tentang Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat dengan SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan olahraga.

Pasal 2 Ayat (3) tentang Unit Pelaksana Teknik Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar yakni:

- a. Membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- b. Pemberian motivasi dan pembinaan kepada masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam melaksanakan asas saling membelajarkan;
- c. Pemberian pelayanan informasi kegiatan pendidikan nonformal pemuda dan olahraga;
- d. Pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu dan pelaksanaan pendidikan nonformal pemuda dan olahraga.;
- e. Penyuusunan pengadaan sarana belajar muatan lokal;
- f. Menyediakan sarana dan fasilitas belajar;
- g. Pengintegrasian dan penyingkronisasian kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan nonformal;
- h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan bagi tenaga pelaksana pendidikan nonformal; dan
- i. Pengolaan urusan tata usaha sanggar;

Yang menjadi fokus pada penelitian ini ialah pada salah satu fungsi dari Sanggar Kegiatan Belajar yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 88 Tahun 2016 pada pasal 2 ayat (3) huruf f yaitu Menyediakan Sarana dan Fasilitas , dan ini ada kesesuaian dari fenomena yang di angkat oleh penulis terkait dengan sarana serta prasarana yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kampar, Adapun program unggulan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar dalam menanggulangi pendidikan anak putus sekolah yaitu:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Pendidikan Taman Kanak- Kanak (TK);
3. Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara Sekolah Dasar (SD);
4. Pendidikan Kesetaraan Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama (SMP);
5. Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara Sekolah Menengah Atas (SMA);
6. Program Kecakapan Hidup untuk dibekali peserta penyuluhan untuk menyadarkan bahaya merokok ,Narkoba,HIVAIDS,Flu Burung hingga Seks Bebas

Pendidikan luar sekolah melaksanakan program pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia kerja (pasar). Dalam melaksanakan kegiatannya, SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) mempunyai dasar hukum secara yuridis dan dasar operasional yang melandasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini mengingat bahwa sasaran Pendidikan Luar Sekolah adalah mereka yang memerlukan kebiasaan yang cepat dan menghasilkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) merupakan lembaga pendidikan alternatif bagi masyarakat yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dilembaga pendidikan formal. Warga belajar adalah warga masyarakat yang mengikuti pembelajaran di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar). (Sanggar Kegiatan Belajar) Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa program SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Kabupaten Kampar belum memenuhi standar.

Tabel I.4 Data Sarana dan Prasarana SKB Kabupaten Kampar

NO	Sarana Dan Prasarana	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Ruang Serba Guna/aula	1
2	Ruang Teori/Kelas	5
3	Ruang Keterampilan	1
4	Kamar madni/WC Umum	1

(1)	(2)	(3)
5	Ruang Guru	1
6	Ruang Perpustakaan	1
7	Gudang	1
8	Ruang Ibadah	1
9	Ruang Tidur Anak	1
10	Gudang	1
11	Ruang UKS	1
12	Lemari	1
13	Rak Buku	1
14	Meja Siswa	23
15	Kursi Siswa	23
16	Kursi Guru	1
17	Kursi dan Meja Tamu	1
18	Perlengkapan Ibadah	2
19	Meja Guru	1
20	Kursi Pimpinan	1

Sumber data Direktorat Jendral PAUD dan Dikmas

Dari Tabel diatas menjelaskan tentang sarana dan prasarana yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar , Dengan jumlah warga belajar secara keseluruhan sebanyak 252 orang peneliti menilai untuk sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar di Sanggar Kegiatan Belajar masih di nilai Kurang memadai dengan jumlah warga belajar yang ada di SKB Kabupaten Kampar ini.

Tabel I.5 Data Sarana dan Prasarana yang rusak di SKB Kabupaten Kampar

NO	Sarana Dan Prasarana yang rusak	Jumlah
1	Kamar mandi/WC Umum	1
2	Ruang kelas	2
3	Gudang	1
5	Kursi	15
6	Meja	11
7	Papantulis	4

Sumber UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar

ruang belajar terdapat 5 ruangan dan dibagi untuk beberapa kelas baik untuk paud, Paket A ,Paket B dan Paket C, kemudian ada beberapa ruangan yang

kondisi struktur bangunannya sudah memerlukan renovasi , kemudian untuk jumlah Kursi dan Meja juga Harus diperhatikan berdasarkan Observasi Peneliti dilapangan melihat beberapa Kondisi Kursi dan Meja yang rusak dan memerlukan perbaiki hal ini sangat dinilai dapat mengganggu Proses belajar mengajar di SKB Kabupaten Kampar.

Dalam otonomi daerah mempengaruhi peran Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal. Banyak permasalahan yang muncul melemahkan peran dan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar pendidikan non formal. Permasalahan tersebut akan diuraikan dan dijelaskan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara interal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya masalah dalam penyelenggaraan untuk memenuhi mutu dan standar kegiatan program tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan beberapa tahun terakhir, permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut.

Berdasarkan fakta dan pengamatan dilapangan, penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan program Sanggar Kegiatan Belajar Dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Kampar, seperti:

1. kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran oprasional bagi Sanggar Kegiatan Belajar sehingga pelaksanaan program terdapat banyak kendala baik dalam hal sarana dan prasarana seperti lokasi tempat belajar yang berjauhan dangan tempat tinggal warga belajar, modul,

buku, alat belajar lainnya sebagai pendukung belajar, pamong belajar atau tutur pendidik yang merupakan salah satu ujung tombak sebagai pengajar yang diduga masih kurang dengan kapasitas siswa atau warga yang mendaftar dari tahun ketahun serta keterbatasan anggaran dari pemerintah.

2. Sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang kompeten sehingga masih masyarakat yang keterbelakangan atau miskin yang biasanya menganggap bahwa tidak penting melanjutkan pendidikan karena menurut pemikiran mereka bahwa nasib seseorang yang kaya tidak harus sekolah tetapi bekerja, dan seharusnya inilah peran penting dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar dengan ketentuan tugas dan fungsi dalam mensosialisasikan program bahwa program ini layak untuk masyarakat yang putus sekolah dan bisa mengetahui apa pentingnya melanjutkan pendidikan di Sanggar Kegiatan Belajar yang merupakan salah satu program untuk mengatasi masalah pendidikan.

Berdasarkan fenomena diatas dan kondisi pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang mempunyai hambatan mengakibatkan tidak efektifnya kinerja program Sanggar Kegiatan Belajar yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf hidup masyarakat untuk masa depan agar lebih baik, Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **“Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar Dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Kampar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti membuat rumusan untuk mempermudah ruang lingkup masalah yang akan dikaji agar peneliti agar penelith bisa fokus pada satu masalah yang di kemukakan. Adapun rumusan masalahnya yaitu : **”Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar Dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Kampar?”**

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, menilai dan menganalisa Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar Dalam Menanggulangi Pedidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar Dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Guna Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memacu perkembangan pengetahuan khusus ilmu pemerintahan dalam memenuhi konsep peran dan pembinaan.
- b. Guna Akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data skunder bagi kalangan akademis lainnya.
- c. Guna Praktis, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan untuk mengembangkan program Sanggar Kegiatan Belajar Dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Kampar.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “ Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam Menaggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah” maka peneliti akan menggunakan beberapa konsep teoritis yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang menghadapi dalam penelitian ini, adapun di dalam menggunakan konsep teoritis tersebut adalah sebagai kerangka pemikiran yang mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian tersebut, antara lain :

1. Konsep Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Sebelum melihat definisi pemerintahan yang dipandang sebagai ilmu. Sebagaimana diungkapkan Suryaningrat (dalam syafie, 2003;34) bahwa disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan karena sudah dipelajari sejak sebelum masehi oleh para filosof yaitu Plato dan Aristoteles.

Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan dengan lembaga, pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari- hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis

Secara etimologi pemerintah berasal dari kata “perintah” yang ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga pemerintahan berarti perbuatan, proses, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah.

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (Syafiie, 2005:11).

Budiarjo (2008:21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut.

Menurut Ndraha (2011:36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses perbuahan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Dengan demikian pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama pemerintahan ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktifitas yang

terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara. Struktur fungsional meyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari beberapa tokoh yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan pemerintah merupakan suatu organisasi, dimana didalamnya terdapat orang- orang yang menjalankan tugas ataupun menjalankan kebijakan- kebijakan untuk kepentingan masyarakat ataupun negara. Untuk menjalankan roda pemerintahan khususnya dalam menjalankan kebijakan- kebijakan pemerintah harus mampu mengayomi masyarakat serta bersifat adil dan bijaksana, sehingga sesuai dengan fungsinya sebagai pemerintah.

b. Fungsi Pemerintahan

Rasyid (2000:13), menyatakan bahwa tugas- tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu : Pelayanan (*serice*), Pemberdayaan (*empowerment*) dan Pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Sementara menurut Ndraha (2011:85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu :

Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggaraan pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berarti itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan. Namun didalam menjalankan ketiga fungsi diatas, pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah.

2. Konsep Ilmu Pemerintahan

Dalam Kehidupan bernegara maka pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi serta memenuhi segala kebutuhan serta memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat sejahtera, adil, dan merata.

Menurut kutipan (Musaneff, 2002, hal 8) yang mengatakan ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari unsure-unsur dinas, yang berkaitan atau saling berhubungan antara dinas dengan masyarakat serta menyatakan pemerintahan yaitu segala bentuk usaha Negara untuk mencapai tujuannya.

Dalam kutipan (Ndraha, 2005, hal. 36) ilmu pemerintahan adalah bentuk kegiatan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintahan merupakan seluruh organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk melengkapi dan menjaga serta keperluan masyarakat.

Ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari aspek-aspek yang menyangkut tentang suatu instansi ataupun lembaga, serta hubungan integritas antara instansi-instansi dengan masyarakat. (Syafiie i. ,2008, hal. 28)

3. Konsep Pemerintah Daerah

Sebelum memasuki pembahasan tentang konsep pemerintahan daerah, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan istilah pemerintahan itu sendiri. Syaukani (2002:33) mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik didalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain. Ditingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya.

Definisi tersebut tampak masih sangat umum, sehingga sulit untuk menentukan maksud dengan pemerintahan tersebut termuat dalam dua bentuk, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit.

Pemerintahan dalam artit luas menyangkut kekuasaan bidang legilatif, eksekutif fan yukdikatif. Demikian juga donner mengemukakan bahwa cakupan pemerintahan dalam arit luas meliputi badan- badan yang menentukan haluan negara dan berkedudukan dipusat, kemudian terdapat juga instansi- instansi yang melaksanakan keputusan dari badan- badan tersebut. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintahan dalam arti lembaga eksekutif saja, yang berfungsi *to execute* atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif dan yudikatif. Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagian wewenang dari seseorang atau instansi atau suatu organisasi merupakan salah satu azas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuan agar kebijakan dapat terlaksanan dengan efektif, meringakan beban kerja pimpinan, memencarkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi. (Mustamin 2004:24-26)

Adaya pemerintahan daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi. Desentralisasi tidak berarti putus sama sekali dengan pusat tapi hanyan menjauh dari pusat. Negara indonesia merupakan suatu organisasi yang besar dan kompleks. Oleh karenanya tidak efektif dan efisien apabila semua kewenangan baik politik maupun administrasi diletakkan pada puncak hirarki organisasi atau hanya pada pemrintah pusat, karena pemrintah pusat akan menanggung beban berat

dan penyelenggaraan pemerintahan tidak akan efisien. Agar kewenangan tersebut dapat diimplementasikan secara efisien dan akuntabel maka sebagian kewenangan politik dan administrasi perlu diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih rendah. Penyerahan sebagian kewenangan politik dan administrasi kepada organisasi yang lebih rendah inilah yang disebut dengan desentralisasi. Jadi Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan politik dan administrasi dari puncak hirarki organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi dibawahnya (pemerintah daerah). Karena jenjang hirarki yang lebih rendah (pemerintah daerah) tersebut disertai wewenang penuh, baik politik maupun organisasi maka pada jenjang organisasi yang disertai wewenang tersebut timbul otonomi.

4. Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksanaan pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan serta rujukan berdirinya Negara dapat tercapai.

Menurut Pertowidagdo dalam Anwar (2011:42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecah permasalahan manfaatnya. Pertama, karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlihat dahulu.

Menurut Dunn (2003:105) perumusan kebijakan adalah merumuskan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah:

1. Pengelolaan informasi , yaitu usaha yangt dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternative-alternatif, merupakan penilaian yang memperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang memiliki badan/instansi terseebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Menurut (Kansil dan Christine 2008:190) kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut (Syafiie i. 2010, hal.150) menyatakan “Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan tyang antara lain berisi tuntunan, dunkungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan ujian, kebutuhan atau keperluan lain-lain yang

mempengaruhi public politik, bukannya sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Menurut kutipan (Winarno, 2012, hal.17) mendefenisikan kebijakan public merupakan dugaan sementara yang menyangkut kejadian serta dampak yang bisa ditafsirkan.

Kemudian masih dalam kutipan (Winarno, 2012, hal. 32-34) adapun rancangan tahap penyusunan kebijakan publik, meliputi:

- a. Formulasi kebijakan;
- b. Adopsi kebijakan;
- c. Implementasi kebijakan;
- d. Evaluasi kebijakan;

5. Konsep Evaluasi

Menurut bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa inggris “evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut penegetian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Banyak sekali pendapat para ahli tentang pengertian evaluasi diantaranya:

Menurut Arikunto (2003) mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan.

Selanjutnya menurut Willam N. Dunn (2003: 608-610) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (Rating), dan penilaian

(assessment). Evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Kebijakan member informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan, telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Kutipan (Ndraha, 2003, hal. 201) evaluasi adalah merupakan rancangan perbedaan antara standar dengan fakta. Selanjutnya menurut (Ndraha, 2003, hal. 202) ada tiga model evaluasi, diantaranya:

1. Before-after, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku, treatment). Tolak ukurnya adalah Before.
2. Model Das sollen- das sein, yaitu perbandingan antara seharusnya dengan senyatanya. Tolak ukurnya adalah Das sollen.
3. Model kelompok control-kontrol tes, yaitu perbandingan dengan kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok control.

Untuk menilai suatu kesuksesan suatu kebijakan, maka perlu dikembangkan beberapa indikator. Adapun indikator keberhasilan yang dikembangkan dalam kutipan (Nugroho, 2009:537)

1. Efektifitas : menyangkut kesuksesan yang diperoleh sesuai dengan keinginan;
2. Efisiensi : menyangkut banyaknya upaya yang dilakukan agar tercapainya tujuan yang diinginkan;
3. Kecukupan : menyangkut tingkat kesuksesan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada;

4. Perataan : berkenaan dengan apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda;
5. Responsivitas : menyangkut penilaian kebijakan yang sesuai dengan keperluan ataupun selera sekumpulan anggota tertentu;
6. Ketetapan ; menyangkut penilaian kesuksesan memiliki tata nilai ataupun sesuai dengan kebutuhan;

Selanjutnya dalam kutipan (Winarno, 2012) evaluasi dimaksudkan perkiraan, penyerahan jumlah, serta penilaian. Evaluasi menyangkut pembuatan informasi meliputi tata nilai ataupun keuntungan dari suatu upaya yang dilakukan. Evaluasi yang menghasilkan informasi yang benar menyangkut kualitas kerja, sesuai kebutuhan, nilai, serta peluang yang dapat dihasilkan dari tungkah laku publik.

Dengan kata lain, evaluasi merupakan penilaian tingkat keberhasilan yang diperoleh dengan perbandingan kesuksesan yang diinginkan, menyangkut beberapa aspek yang berdampak terhadap tingkat kesuksesan ataupun kegagalan. Evaluasi bisa dilaksanakan oleh pihak yang sedang melaksanakan kegiatan yang sedang di evaluasi maupun bisa dilakukan oleh orang lain, juga bisa dilaksanakan sesuai aturan atau tidak. Setelah sesuatu kegiatan berakhir, maka dilakukan proses penilaian atau pertimbangan mengenai hasil kegiatan berakhir, maka dilakukan proses penilaian atau pertimbangan mengenai hasil kegiatan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan pencapaian target atau tidak sesuai.

6. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan

setelah perencanaan sudah siap. Secara sederhana pelaksanaan biasanya diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Widavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah peluasan aktivitas yang slaing menyesuaikan Nurdin Usman. (2002:70)

Pengertian-pengertian diatas memeperlihatkan bahawa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tatapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh bedasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat dilaksanakannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tidak lanjut setelah program kebijaksanaan, ditetapkan yang terdiri dari atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun oprasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengetahuan yang dikemukakan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintahan harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsisten informasi yang disampaikan.
- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sesuai dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola baku.

Keempat faktor di atas, dianggap mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dengan faktor yang lain, selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.

- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat diatas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsure tersebut.

7. Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar adalah Suatu tempat atau sarana yang di gunakan oeh suatu komunika atau sekumpulan orang untuk melakukan suatu kegiatan. Selama ini suatu tempat dengan nama “sanggar” bisa digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Sanggar ibadah : tempat untuk beribadah biasanya di halaman belakang rumah (tradisi masyarakat jaman dahulu)
- b. Sanggar seni : tempat belajar seni (lukis, tari,teater, musik, kriya/kerajinan)
- c. Sanggar kerja : tempat untuk bertukar fikiran tentang suatu pekerjaan
- d. Sanggar anak: tempat untuk anak-anak belajar suatu hal tertentu di luar kegiatan sekolah.dll

Sanggar kursus juga merupakan salah satu lembaga pelatihan yang termasuk ke dalam jenis pendidikan Non Formal, sehingga hal ini kadang menimbulkan kerancuan pemahaman tentang sanggar dan kursus, untuk membedakan hal tersebut dapat kita lihat dalam penjelasan di bawah ini.

Sanggar dan kursus adalah sama-sama merupakan lembaga pelatihan dan keduanya termasuk kedalam jenis pendidikan nonformal, namun antara sanggar dan kursus memiliki perbedaan, adapun perbedaan tersebut adalah :

- a. Kursus biasanya hanya mencakup proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar ,sedangkan sanggar mencakup seluruh proses dari awal hingga akhir yaitu mencakup proses pengenalan,pembelajaran,penciptaan atau membuat karya, dan produksi
- b. Kursus biasanya menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam waktu singkat jadi peserta pelatihan dalam lembaga kursus tersebut hanya menjadi anggota selama 3 bulan saja,setelah itu peserta mendapatkan sertifikat dan ke anggotaan kursus berakhir, sedangkan pada sanggar seni memiliki masa keanggotaan lebih lama bahkan terkesan tidak ada batas waktu keanggotaan

Adapun Sanggar Kegiatan Belajar atau disingkat SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada di bawah Dinas Pendidikan di Tingkat Kabupaten/ Kota.UPTD Sanggar Kegiatan Belajar bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas Pendidikan dalam rangka mengembangkan model pendidikan anak usia dini, non formal dan informal di tingkat Kabupaten/Kota

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	5	6
1	Gusdinilawati Thohir (2014)	Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti (Sumber skripsi)	Sama-sama meneliti tentang Evaluasi Pelaksanaan	Penelitian ini mengkaji tentang evaluasi dalam memberdayakan masyarakat, sedangkan penelitian saya mengkaji tentang evaluasi program sanggar kegiatan belajar.
2	Herli Anggara (2013)	Prgram Kantor Unit Pelaksana Tugas Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Dalam Meningkatkan Kecakapan Hidup Masyarakat Di Kota Metro (Sumber skripsi)	Sama-sama meneliti tentang Program Sanggar Kegiatan Belajar	Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecakapan hidup masyarakat, sedangkan penelitian saya menanggulangi pendidikan anak putus sekolah.
3	Putri Indra ningrum (2015)	Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Pekanbaru (Sumber Skripsi)	Sama-sama meneliti Evaluasi Pelaksanaan Program	Penelitian ini meneneliti tentang keluarga berencana Sedangkan penelitian saya meneliti tentang sanggar kegiatan belajar.

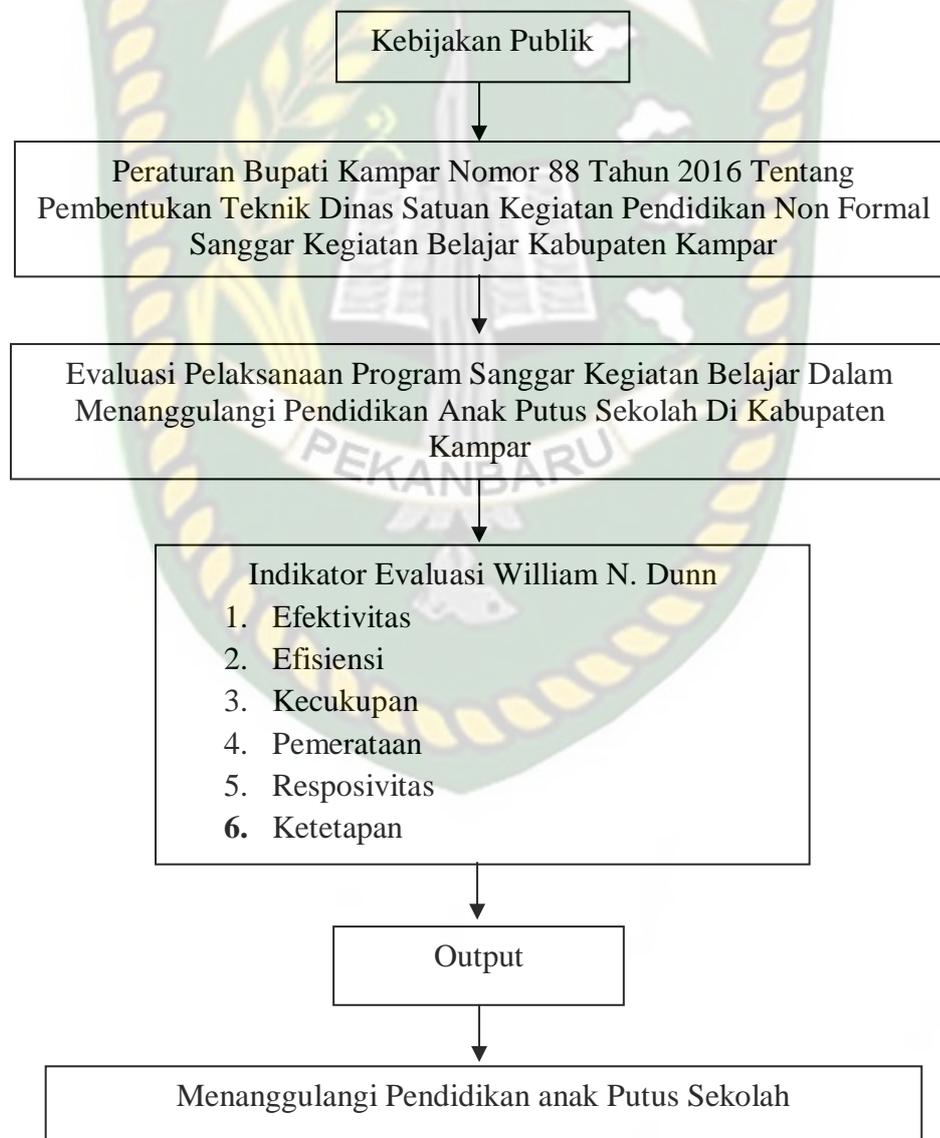
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Muhammad Adil Arnady (2016)	Evaluasi Program Kecakapan Hidup Di Sanggar Kegiatan Belajar (Sumber Jurnal Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, Vol 3 No.1, Hal 60-74,	Sama-sama meneliti tentang Program Belajar	Penelitian ini meneliti tentang evaluasi program Kecakapan hidup, sedangkan penelitan saya meneliti tentang menanggulangi pendidikan anak putus sekolah.
5	Melati Indri Hapsari (2008)	Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Pamong Belajar Program Sanggar Kegiatan Belajar (Sumber Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF, Vol 3 No 2, 2008)	Sama-sama meneliti tentang Sanggar Kegiatan Belajar	penelitian ini mengkaji tentang pengembangan dan peningkatan kinerja pamong belajar, sedangkan saya meneliti tentang menanggulangi anak putus sekolah
6	Ika Rizqi Meilya dan Ibnu Syamsi (2015)	Evaluasi Program Pelatihan In-Hous Training Pembelajaran Paket C Di Sanggar Kegiatan Belajar Jawa Tengah (Sumber Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol 2 No 2, Hal.156-174 2015)	Sama-sama meneliti tentang Program Sanggar Kegiatan Belajar	Penelitian ini Mengakaji tantang pelatihan in-House Traning pembelajaran paket c sedangkan saya meneliti tentang menggulangi pendidikan anak putus sekolah

Pada tabel II.1 diatas menjelaskan terkait dengan peneletian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang di angkat oleh peneliti berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaa Program Sanggar kegiatan Belajar dalam menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kampar, penelitian terdahulu ini juga bertjuan sebagai bahan perbandingan dan juga masukan yang berguna untuk penulis , serta menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian

sehingga penulis dapat memperkaya teori yang akan di gunakan dalam penelitian yang dilakukan pada tabel diatas terdapat 6 Penelitian terdahulu yang mana penulis memaparkan persamaan dan perbedaan setiap peneliti yang ada dengan permasalahan yang sama.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar Dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Kampar.



Sumber : Modifikasi Penulisan 2020

D. Konsep Operasional

1. Evaluasi memiliki pengertian yaitu penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan dari suatu kebijakan yang dilakukan.
2. Efektifitas yaitu pemanfaatan sumber daya ataupun sarana dan prasarana dan total angka yang telah ditetapkan bertujuan menghasilkan barang serta jasa yang dijalankan dalam suatu kegiatan.
3. Efisiensi merupakan suatu penilaian kesuksesan, dilihat mulai dari sumber ataupun biaya yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
4. Kecukupan adalah pencapaian keinginan yang telah didapatkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
5. Pemerataan adalah melengkapi kebutuhan yang sesuai dengan setiap individu butuhkan, diberikan kepada sasaran yang tepat.
6. Responsivitas reaksi dari suatu kegiatan, menyangkut respon sasaran penilaian melalui pelaksanaan kebijakan serta sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dimasyarakat.
7. Ketepatan merupakan hasil yang diinginkan bisa tercapai dan tidaknya, serta pencapaian hasil harus bermanfaat atau bernilai yang baik.
8. Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten atau kota dalam bidang pendidikan dan

merupakan perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dalam pendidikan tingkat kecamatan.

10. Menaggulangi adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu masalah.
11. Sanggar Kegiatan Belajar merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani pendidikan luar sekolah yang memiliki tugas pokok serta fungsinya sebagai pembuat percontohan dan pengendalian mutu program pendidikan luar sekolah dan pemuda.
12. Satuan Pendidikan Non Formal selanjutnya disingkat satuan PNF adalah proses belajar terjadi secara teroganisasikan di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal, baik dilaksanakan terpisah maupun merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih besar yang dimaksudkan untuk melayani sasaran didik tertentu dan belajarnya tertentu pula (Marzuki 2012:136)

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar Dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah.

Konsep (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Item Penelitian (4)
Evaluasi merupakan dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. (Dunn, dalam Rian Nugroho, 2009: 536)	Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar Dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Kampar.	1. Efektifitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Pemerataan	<p>a. Adanya sosialisasi ke masyarakat.</p> <p>b. Adanya pembinaan tentang Sanggar Kegiatan Belajar.</p> <p>a. Adanya Penyuluhan dalam pelaksanaan Sanggar Kegiatan Belajar.</p> <p>b. Adanya Kerjasama dengan Masyarakat.</p> <p>a. Masih adanya masyarakat yang tertinggal dalam program sanggar kegiatan belajar.</p> <p>b. Tidak sebandingnya penyediaan tenaga penyuluhan Sanggar Kegiatan Belajar dengan jumlah masyarakat yang ada.</p> <p>a. Adanya tim pengawas dalam pelaksanaan pelayanan Sanggar Kegiatan Belajar.</p> <p>b. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Sanggar Kegiatan Belajar.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
		5. Responsivitas 6. Ketepatan	a. Pelaksanaan program Sanggar Kegiatan Belajar dengan baik. b. Banyaknya pihak yang mengikuti aturan. a. Pelaksanaan penyelenggaraan program Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan sasaran yang dituju. b. Pelaksanaan program Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan aturan yang ada.

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif yaitu memaparkan peristiwa yang terjadi. Penelitian Kualitatif adalah suatu proses yang lebih di maksudkan untuk memahami masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan dan menyajikan gambaran menyeluruh dan kompleks, melaporkan pandangan dengan rinci dari sumber informan, serta dilakukan secara alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari penulis (Creswell.2014;15)

Penelitian Kualitatif merupakan penelitian interpretif, yang di dalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus menerus dengan para partisipan. Keterlibatan inilah yang nantinya memunculkan serangkaian isu-isu strategi, etis, dan personal dalam proses penelitian kualitatif (Locke dalam Creswell.2014;229)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Salo KM.2,3 Simpang Siabu Kabupaten Kampar. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini atas pertimbangan bahwa evaluasi pelaksanaan program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sejauh ini masih belum maksimal, hal ini terlihat dari fenomena yang memang mendukung hal tersebut seperti masih belum efektifnya kinerja dari evaluasi pelaksanaan program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kabupaten Kampar

Kecamatan Salo memiliki 6 Desa dan penelitian difokuskan untuk 1 Desa yang menjadi lokasi penelitian yakni : Desa Salo. Karena di Desa ini program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) telah berjalan dan memiliki beberapa kendala yang menghambat evaluasi pelaksanaan kerja program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ini mungkin terjadi karena kurangnya pembinaan dari Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas terhadap program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tersebut.

C. Informan dan Key Informan

Dalam Penelitian ini yang menjadi sumber informasi penulis adalah informan-informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informa dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah serta informasi objek yang ingin di teliti. Teknik penunjukan informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purpose sampling, dengan pertimbangan bahwa informan yang di tunjuk mengetahui serta memahami masalah. Maka , dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah :

Tabel III.1 Informan Penelitian

No	Informan dan Key Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
2.	Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	1
3.	Pamong Belajar	1
4.	Warga Belajar PAUD, TK, Paket A, B, dan C	15

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

Yang menjadi Key Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Kemudian selanjutnya yang

menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Unit teknis pelaksanaan Dinas Sanggar Kegiatan Belajar ,kemudian Pamong Belajar dan Warga Belajar PAUD,TK, Paket A,B, dan C.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan yaitu :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung melalui sumber utama dilapangan, melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar, Pamong dan Tutor, dengan mengajukan berbagai pertanyaan seputar Pelaksanaan Progam Sanggar Kegiatan Belajar. Seperti Sosialisasi, Penyuluhan, Pembinaan dibidang Sanggar Kegiatan Belajar.

2. Data Sekunder

Yaitu sumbernya adalah dokumen yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian ini yaitu dokumen yang diperoleh memelalui perpustakaan, instansi/kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Buku-Buku, Laporan-Laporan penelitian yang sudah ada serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap yang dibutuhkan penulis sebagai ajukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterikatan data yang baik secara langsung maupun tidak

langsung terhadap fokus penelitian, pengumpulan data penelitian dilaksanakan dengan:

a. Wawancara

Wawancara yang di lakukan oleh peneliti baik secara lansung (face to face), melalui telepon atau media lainnya, maupun terliba secara langsung dalam suatu kelompok tertentu yang terdiri dari enam sampai delapan responden. Pertanyaan yang diberikan dalam wawancara kualitatif umumnya bersifat tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dengan sengaja diciptakan untuk memunculkan pandangan maupun opini dari para responden wawancara (Creswell,2014:267)

b. Observasi

Observasi yang di lakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung kelapangan atau lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin di teliti,peneliti mencatat dan atau merekam proses observasi berupa aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian baik terstruktur maupun tidak terstruktur yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden sebagai proses pengumpulan data. Peneliti dapat terjun langsung menjad partisipan untuk mengumpulkan data, atau hanya menjadi non-partisipan (Creswell.2014;267)

c. Dokumentasi

Dokumentasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh gaya bahasa dan kata-kata dari partisipan.dengan mengakses dokumen-dokumen pribadi dari partisipan,peneliti akan memahami pola bahasa yang di miliki partisipan, baik secara verbal maupun bahasa perilaku sehingga memudahkan peneliti untuk mengkaji permasalahannya yang berkaitan dengan partisipan dengan baik. Selain

itu dokumentasi sebagai bukti tertulis yang dapat di akses sewaktu-waktu sesuai kebutuha peneliti (Creswell,2014;268)

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, yaitu melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, dan selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan di lakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran

G. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar Dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Kampar.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke ...																			
		Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP			■	■																
3	Revisi UP			■	■																
4	Revisi Kuissioner			■	■																
5	Survey Lapangan							■	■	■	■	■	■								
6	Konsultasi Revisi Skripsi													■	■	■	■				
7	Ujian Komferehensif Skripsi																	■	■	■	■
8	Revisi Skripsi																	■	■	■	■
9	Penggandaan Skripsi																			■	■

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun Sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini di bahas 6 bab, dimana pembahasan-pembahasan bab mempunyai antara satu dengan yang lainnya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya di bahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini membahas landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan di uraikan kerangka pikir, konsep operasional dan operasional penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini tentang Metode Penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, Informan dan Key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan uji hipotesis, jadwal kegiatan penelitian serta rencana sistematika laporan penelitian

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

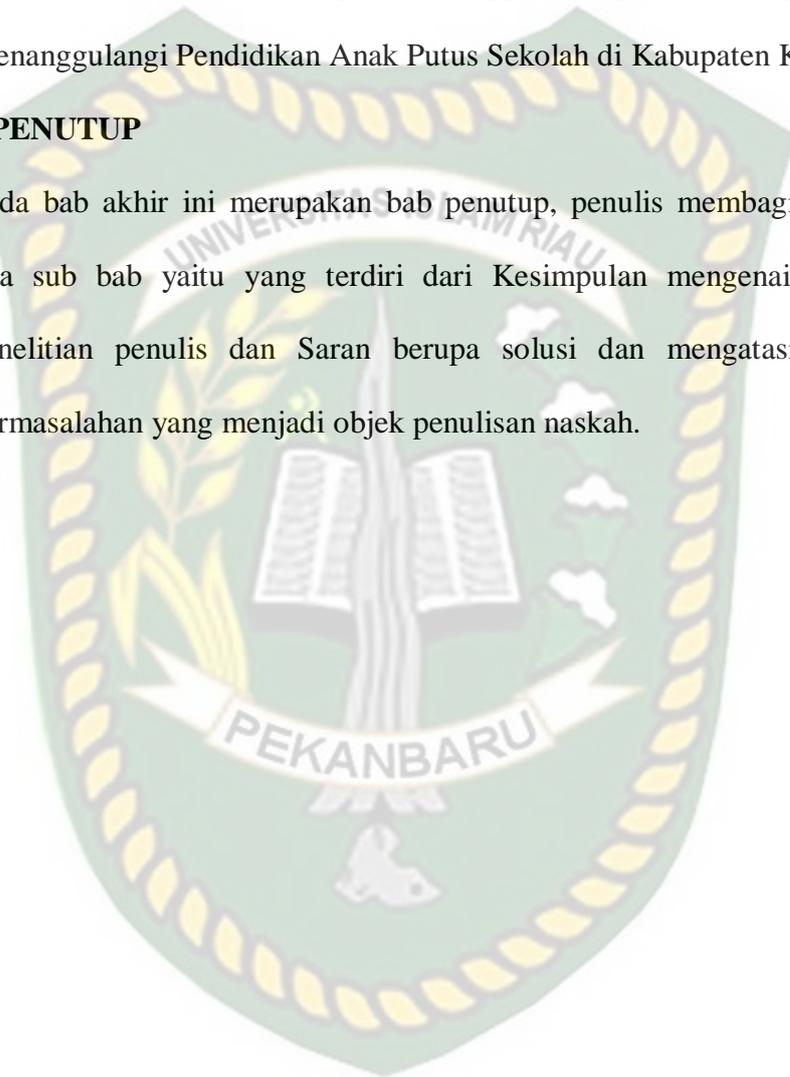
Deskripsi lokasi penelitian yang terdiri dari Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Fungsi, Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sumber Daya Organisasi, Serta Sumber Daya Manusia, Dan Lokasi Penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kampar.

BAB VI PENUTUP

Pada bab akhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya dalam dua sub bab yaitu yang terdiri dari Kesimpulan mengenai ringkasan penelitian penulis dan Saran berupa solusi dan mengatasi sejumlah permasalahan yang menjadi objek penulisan naskah.



BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor:10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

- a. Pekanbaru sudah menjadi ibukota Provinsi Riau.
- b. Pekanbaru selain menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
- c. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibukota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
- e. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruhwilayah kecamatan dan sebaliknya.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 tahun 1994 dan PP No 8 tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau No. 06 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek Percontohan Otonomi. Guna kelancaran pemerintahan berdasarkan Permendagri No 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah, sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 61 tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas (Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum).

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, bermunculan daerah Kabupaten / Kota yang baru di Propinsi Riau yang berasal dari pemekaran beberapa Kabupaten, termasuk di Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) Wilayah Pemerintahan yaitu:

- a. Kabupaten Kampar terdiri dari 8 Kecamatan meliputi 153 Desa dan 8 Kelurahan dengan Ibu Kota Bangkinang.
- b. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 4 Kecamatan meliputi 81 Desa dan 4 Kelurahan dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci.
- c. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan meliputi 89 Desa dan 6 Kelurahan dengan Ibu Kota Pasir Pangaraian.

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Kampar terletak antara 01⁰⁰'40'' Lintang Utara dan 00²⁷'00'' Lintang Selatan dan antara 100²⁸'30'' – 101¹⁴'30'' Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografisnya, kabupaten Kampar memiliki

batas-batas:

- a. Utara – Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak
- b. Selatan – Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Barat – Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat
- d. Timur – Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu:

- a. Sungai Kampar yang panjangnya \pm 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Kuok, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.
- b. Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya \pm 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Iklim dan Curah Hujan Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis. Curah hujan tertinggi selama tahun 2013 terjadi di Kecamatan Salo pada bulan Desember dengan ketinggian curah hujan yang mencapai 728 mm. Jumlah hari hujan dalam tahun 2013, yang terbanyak adalah di Kecamatan Gunung Sahilan yang menunjukkan peningkatan dari bulan juni sampai desember. Dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan yang memiliki wilayah terluas yakni 1.365.98 KM² (12,10%) sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya merupakan Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 76,92 KM².

2. Keadaan Demografi

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, yang mana merupakan aset penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Diharapkan bukan hanya jumlahnya saja yang besar tetapi kualitas penduduknya juga baik. Penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 793.005 jiwa yang terdiri atas 407.228 jiwa (51,3 persen) penduduk laki-laki dan 385.777 jiwa (48,6 persen) penduduk perempuan. Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 105 yang berarti jumlah penduduk laki-laki 5 persen lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Kabupaten Kampar tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 2,57 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 2,55 persen dan penduduk perempuan sebesar 2,58 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,56.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kampar tahun 2015 mencapai 71 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Distribusi penduduk menurut kecamatan sangat bervariasi dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kampar dengan kepadatan sebesar 371 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebesar 10 jiwa/km². Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,55 persen dari tahun 2014. Selengkapnya tentang luas wilayah, jumlah penduduk, serta kepadatan penduduk di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
		(Km ²)	(Jiwa)	(Jiwa/Km ²)
1	Kampar Kiri	915,33	29.987	33
2	Kampar Kiri Hulu	1.301,25	11.876	10
3	Kampar Kiri Hilir	759,74	11.462	16
4	Gunung Sahilan	330,59	19.736	60
5	Kampar Kiri Tengah	597,97	26.953	46
6	XIII Koto Kampar	732,40	24.144	33
7	Koto Kampar Hulu	674,00	18.939	29
8	Kuok	151,41	25.186	167
9	Salo	207,83	25.954	125
10	Tapung	1.365,97	95.476	70
11	Tapung Hulu	1.169,15	81.936	71
12	Tapung Hilir	1.013,56	60.106	60
13	Bangkinang Kota	177,18	39.773	225
14	Bangkinang	253,50	33.043	131
15	Kampar	136,28	50.555	371
16	Kampar Timur	173,08	24.528	142
17	Rumblo Jaya	76,92	17.192	224
18	Kampar Utara	79,84	17.242	216
19	Tambang	371,94	61.027	165
20	Siak Hulu	689,80	100.253	146
21	Perhentian Raja	111,54	17.637	159
Jumlah				
2018		11.289,28	793.005	71
2019		11.289,28	773.171	69

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2019

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,7 persen dengan jumlah penduduk sebanyak 773.171 jiwa dan tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,57 persen dengan jumlah penduduk 753.376 jiwa. Penduduk menurut golongan umur memiliki jumlah tertinggi pada kisaran umur 0-4 tahun yaitu sebesar 92.505 jiwa dan jumlah terendah ada pada kisaran

umur 60-64 tahun yaitu sebesar 13.984 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan yaitu sebanyak 407.228 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 385.777 jiwa.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

B. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956, kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 , maka Kabupaten Kampar resmi di mekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten Induk. Kabupaten Kampar terletak pada $01^{\circ}.00' 40''$ Lintang Utara, $00^{\circ} 27' 00$ Lintang selatan dan $100^{\circ} 28'30'' - 101^{\circ} 14' 30''$ Bujur Timur dengan Luas wilayah $11.289,28 \text{ Km}^2$ atau + 11,62 % dari luas wilayah Propinsi Riau ($94.561,60 \text{ Km}^2$) beriklim tropis dengan curah hujan antara 200 – 300 mm/tahun. Ibu kota Kabupaten Kampar berpusat di Bangkinang yang berjarak kurang lebih 60 Km dari Kota Pekanbaru, dan terbagi dalam 21 Kecamatan, yaitu terdiri dari 242 Desa dan 8 Kelurahan.

Kabupaten Kampar mempunyai batas wilayah : Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Sebelah Barat berbatas dengan

Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera barat, Sebelah Utara berbatas dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kampar dilintasi oleh dua sungai besar yaitu sungai Kampar yang panjangnya kurang lebih 413,5 Km, dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar 143 m. Pada bagian hulu sungai ini bercabang dua yaitu sungai kampar kanan dan sungai kampar kiri, pada bagian hulu sungai kampar kanan terdapat PLTA koto panjang dengan luas genangan

12.000 Ha. Berfungsi sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang mampu mensuplay kebutuhan energi listrik sebesar 114 Kwt. Selain Sungai Kampar, Kabupaten juga terdapat sungai Tapung Kiri yang panjangnya kurang lebih 90 Km dan sedalam 8 – 12 m, selain berfungsi sebagai sumber energi, sungai di Kabupaten kampar juga dimanfaatkan sebagai lahan penghidupan masyarakat.

C. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama bahwa visi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yaitu: ” mewujudkan pendidikan yang aspiratif, berkualitas dan mandiri tahun 2025”.

Dari visi diatas maka dapat dirumuskan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar adalah :

1. Mewujudkan pelayananprima, baik internal organisasi maupun pelayanan publik
2. Mewujudkan akses pendidikan merata dan bermutu disemua jenjang dan jenis pendidikan

3. Mewujudkan insan pendidikan yang berakhlak dan bermoral, bermutu dan berdaya saing pendidikan
4. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
5. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan

D. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar agar "berhasil guna" dan "berdaya guna" perlukiranya dalam pelaksanaannya diberi uraian tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya.

Susunan Organisasi berikut Tata Kerja Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar adalah sebagaimana berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub bagian Perlengkapan
3. Kepala Bidang Keuangan
 - a. Seksi Perbendaharaan
 - b. Seksi Verifikasi
 - c. Seksi Anggaran
4. Kepala Bidang TK, Pendidikan Dasar
 - a. Seksi Pendidikan SD/MI
 - b. Seksi Pendidikan TK
 - c. Seksi Pendidikan SMP
5. Kepala Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PLS
 - a. Seksi PLS
 - b. Seksi Pendidikan SMA
 - c. Seski Pendidikan SMK

6. Kepala Bidang Bina Program
 - a. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Seksi Data dan Informasi
 - c. Seksi Penyusunan Program
7. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga
 - a. Seksi Pemuda dan Kepramukaan
 - b. Seksi Keolahragaan
 - c. Seksi Pengembangan
8. Pengawas Sekolah
 - a. UPTD Kecamatan

Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas rumah tangga daerah dibidang pendidikan serta melaksanakan tugas pembantu yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang disebutkan diatas, Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mempunyai Fungsi :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas dinas dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Pembinaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan pendidikan dan pelatihan kearah peningkatan mutu pendidikan, pemuda dan olahraga.
- d. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dalam hal pengawasan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- e. Administrasi yang merupakan segala usaha dan kegiatan dalam bidang

ketatausahaan, umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.

- f. Koordinasi yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan kerja sama dengan dinas dan instansi lain guna kelancaran tugas- tugas yang ada.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar memiliki tugas – tugas pokok meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, inventarisasi, penggandaan, administrasi kepegawaian.

Uraian tugas – tugas pokok dan fungsi meliputi :

- 1) Melaksanakan urusan Umum.
- 2) Melaksanakan urusan Kepegawaian
- 3) Melaksanakan urusan Rumah Tangga, peralatan dan perlengkapan.

Untuk lebih jelas dalam pembagian tugas dan fungsi dalam setiap sub bagian akan dijelaskan secara rinci pada uraian berikut ini :

1) Kepala Sub Bagian Umum

Tugas pokok : melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pengadaan.

Uraian tugas pokok dan fungsinya adalah :

- a) Menyusun rencana dan program tahunan Sub Bagian Umum.
- b) Meneliti dan menyempurnakan segi teknis konsep surat, kawat naskah dan lain sejenisnya dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Meneliti kesesuaian antara pokok surat dan isi surat.
- d) Memberi nomor konsep surat yang sudah ditandatangani.
- e) Memberi nomor surat kawat.
- f) Memilih surat masuk berdasarkan jenis dan urgensinya.
- g) Mencatat surat-surat penting pada kartu kendali.
- h) Mencatat surat-surat biasa/rahasia pada lembar pengantar surat

rahasia.

- i) Mendistribusikan surat ke unit pengolahan yang bersangkutan.
- j) Melaksanakan pengetikan dan penggandaan surat.
- k) Membuat Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas Pada Pegawai Dinas dan Pengawas Sekolah.

2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Tugas pokok : melaksanakan administrasi kepegawaian

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

- a) Menyusun rencana dan program tahunan Sub Bagian Kepegawaian.
- b) Menyusun formasi pegawai pada lingkungan Dinas, Cabang Dinas dan Pengawas.
- c) Melaksanakan mutasi pegawai.
- d) Melaksanakan cuti pegawai.
- e) Melaksanakan usaha peningkatan disiplin pegawai.
- f) Menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
- g) Melaksanakan usaha peningkatan kesejahteraan pegawai.
- h) Melaksanakan kenaikan pangkat pegawai.
- i) Mempersiapkan pegawai yang akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
- j) Menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai.
- k) Mengurus administrasi pembinaan pegawai.
- l) Menyusun laporan tahunan sub bagian kepegawaian.
- m) Penyelenggaraan administrasi, rencana pengadaan guru, penempatan dan pembinaan Kepala Sekolah, guru SD.
- n) Mempersiapkan rencana pemerataan tenaga jaga SD/Tata Usaha SLTP dan SLTA.
- o) Mempersiapkan rencana penempatan dan mutasi jaga SD, guru dan Tata Usaha SLTP dan SLTA.

- p) Mengurus administrasi kepegawaian (pensiun, kenaikan pangkat, kartu pegawai dan izin cuti).
- q) Mempersiapkan rencana pemerataan tenaga guru.
- r) Mempersiapkan usaha peningkatan profesi guru pada Sekolah Dasar
- s) Mempersiapkan bahan usulan pengangkatan Calon Kepala Sekolah Dasar.
- t) Menyusun rencana kebutuhan pelatihan bagi tenaga pendidik dan tenaga administrasi.

3) Kepala Sub Bagian Perlengkapan

Tugas pokok : Merencanakan pelaksanaan dan mengawasi urusan rumah tangga Dinas yang meliputi bidang peralatan dan perlengkapan, inventaris, kesejahteraan, keamanan, keindahan dan perbaikan dilingkungan dinas dan cabang dinas.

Uraian tugas dan fungsi meliputi :

- a) Menyusun rencana dan program tahunan Sub Bagian Perlengkapan.
- b) Menyusun rencana umum kebutuhan dan barang serta perlengkapan termasuk mobiler untuk kantor dinas, cabang dinas dan rumah dinas.
- c) Pendidikan secara umum kebutuhan dan barang serta perlengkapan termasuk mobiler untuk kantor dinas, cabang dinas dan rumah dinas, SD, SLTP, SLTA yang bersifat rutin.
- d) Mengatur dan menyiapkan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara.
- e) Melaksanakan kegiatan rumah tangga kantor dan rumah dinas serta mengkoordinir pakaian dinas.
- f) Melaksanakan kegiatan dalam hal kerja sama dengan instansi lain yang berhubungan dengan perlengkapan.
- g) Membuat laporan tahunan Sub Bagian Perlengkapan.

4) Kepala Bidang Keuangan

Tugas pokok meliputi :melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

- a) Menyusun rencana dan program tahunan Sub Bagian Keuangan.
- b) Menyusun dan mengusulkan Anggaran Rutin Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Kecamatan se-Kabupaten Kampar.
- c) Melaksanakan pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggung jawaban dan pembukuan.
- d) Melaksanaa pencatatan dan pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran anggaran rutin dan pembangunan.
- e) Mengajukan permintaan pembayaran gaji pegawai Dinas Pendidikan, Guru PNS TK/SD, Guru Tidak Tetap dan Guru DPB/DPK setiap bulan.
- f) Melaksanakan pembayaran biaya perjalanan dinas.
- g) Membuat laporan tahunan Sub Bagian Keuangan.

5) Kepala Bidang Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar

Tugas pokok meliputi : Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum Pendidikan Dasar.

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

- a) Menyusun rencana dan program tahunan masing masing seksi.
- b) Menyusun program pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan sekolah Pendidikan TK, SD/MI, dan SLTP.
- c) Mengelola dan mengembangkan teknis evaluasi sekolah
- d) Menyebarkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan tentang metode mengajar dan evaluasi belajar kurikulum Pendidikan

TK, SD/MI, dan SLTP.

- e) Menilai dan menyusun bahan evaluasi.
- f) Memonitoring dan melaksanakan pencatatan dan memeriksa keabsahan Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan TK, SD/MI dan SLTP.
- g) Melaksanakan monitoring pelaksanaan semester, kenaikan kelas EBTA dan EBTANAS.
- h) Mempersiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar di sekolah.

6) Kepala Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PLS

Tugas pokok meliputi : Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum serta mengembangkan standar kompetensi siswa.

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

- a) Menyusun rencana dan program tahunan masing-masing seksi
- b) Menyusun program pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan sekolah.
- c) Mengelola dan mengembangkan teknis evaluasi sekolah.
- d) Menyebarkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan tentang metode mengajar dan evaluasi belajar.
- e) Menilai dan menyusun bahan evaluasi
- f) Memonitor dan melaksanakan pencatatan dan pemeriksaan keabsahan Surat Tanda Tamat Belajar.
- g) Melaksanakan monitoring pelaksanaan semester, kenaikan kelas, EBTA dan EBTANAS.
- h) Mempersiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar di sekolah.

7) Kepala Bidang Bina Program

Tugas pokok meliputi : Melaksanakan pengumpulan dan proses data dan

informasi serta pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan.

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

- a) Menyusun rencana dan program tahunan seksi.
- b) Merencanakan pengadaan, penyaluran dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan.
- c) Merencanakan dan penyaluran bantuan/subsidi dalam bidang pendidikan.
- d) Mempersiapkan usul pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana.
- e) Menyebarkan petunjuk penggunaan sarana pendidikan.
- f) Mempersiapkan bahan bimbingan penggunaan sarana pendidikan.
- g) Mempersiapkan bahan usul data rehabilitasi gedung dan pembangunan TK, SD dan sebagainya.

8) Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga

Tugas pokok meliputi : melaksanakan rencana, program dan kegiatan dan melaksanakan pembinaan pengembangan generasi muda dan pembinaan dibidang keolahragaan.

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

- a) Menyusun rencana dan program kerja tahunan bidang pemuda dan olahraga.
- b) Menyusun program kegiatan pembinaan dan pengembangan generasi muda dan pembinaan olahraga.
- c) Memberikan dan mengembangkan pelaksanaan kegiatan generasi muda dan olahraga.
- d) Melaksanakan pembinaan pengembangan generasi muda dan pembinaan dibidang olahraga.
- e) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keolahragaan dan kegiatan kepemudaan.

- f) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan pengembangan generasi muda dan keolahragaan.
- g) Mempersiapkan peningkatan usaha kerja sama dengan instansi pemerintah serta organisasi kemasyarakatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengembangan generasi muda dan keolahragaan.

9) Pengawas

Tugas pokok meliputi : menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta.

Uraian tugas dan fungsi meliputi :

- a) Menyusun rencana dan program pengawas sekolah.
- b) Menilai hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru.
- c) Mengumpulkan dan mengolah data daya pendidikan, proses belajar mengajar/bimbingan dan lingkungan sekolah.
- d) Menganalisis hasil belajar/bimbingan siswa guru dan sumber daya pendidikan.
- e) Melaksanakan pembinaan kepada guru dan tenaga lainnya disekolah.
- f) Menyusun laporan dan hasil pengawas

E. Deskripsi UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Kampar

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Kampar berawal dari Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) yang berdiri pada tahun 1974 di bawah Bidang Pendidikan Masyarakat Provinsi Riau. Tahun 1978 PLPM berubah menjadi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kampar. Berdasarkan keputusan Bupati Kampar nomor 184/kpts/2001 SKB menjadi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) SKB Kampar di bawah Dinas Pendidikan

Kabupaten Kabupaten Kampar. SKB Kabupaten Kampar memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan dan membuat percontohan program kesetaraan dan kursus institusional (Peraturan Bupati No.131 tahun 2008, pasal 3).

F. Profil Sanggar Kegiatan Belajar Kampar

Nama lembaga : UPT sanggar Kegiatan Belajar Kamar

Akte notaries : Keputusan Bupati No. 88 Tahun 2016

G. Visi dan Misi SKB Kampar

Visi dan Misi SKB Kabupaten Kampar merupakan sikap kerja yang ditanamkan oleh kepala dan karyawan UPT SKB Kampar sebagai upaya mewujudkan visi SKB Kabupaten Kampar agar menjadi lembaga yang berkualitas.

Visi SKB Kabupaten Kampar.

Pengembangan pusat data, percontohan program Pendidikan Non Formal Informal (PNFI), Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal Informal (PNFI).

Misi SKB Kabupaten Kampar :

- 1) Wewujudkan pusat data Pendidikan Non Formal Informal.
- 2) Melaksanakan percontohan Program Pendidikan Non Formal dan Informal yang berkualitas.
- 3) Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kursus Institusional.

- 4) Meningkatkan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Non Formal Informal.
- 5) Melaksanakan Pengembangan Model Pendidikan Non Formal dan Informal.

Tugas Pokok UPT (Unit Pelaksana Teknis) SKB Kampar :

Menurut Peraturan Bupati No 131 tahun 2008, Pasal 3, tugas pokok UPT SKB Kampar adalah melaksanakan penyelenggaraan dan membuat percontohan program kesetaraan dan kursus institusional.

Fungsi UPT SKB Kabupaten Kampar :

Paraturan Bupati No.88 tahun 2016 pasal 4 menjelaskan bahwa Fungsi UPT SKB Kabupaten Kampar adalah :

- a. Penyusunan rencana kegiatan UPT
- b. Penyusunan kebijakan teknis UPT
- c. Pelaksanaan pelayanan pendidikan kesetaraan dan kursus Institusional
- d. Pembinaan dan pelayanan pendidik kesetaraan dan kursus institusional
- e. Pengelolaan ketatausahaan UPT SKB
- f. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang penyelenggaraan dan pembuatan percontohan program pendidikan kesetaraan dan kursus institusional dan,
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT SKB.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Informan yang terdapat didalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat itu. Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Kampar, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin Informan

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bulan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Kampar. Distriusi Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel V.1 Indentitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	7	70%
2	Perempuan	3	30%
Jumlah		10	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaitu informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 7 orang dengan persentase 70%, dan informan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3 orang dengan persentase 30%. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan Informan dalam penelitian ini di dominasi oleh laki-laki.

2. Tingkat Pendidikan Informan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian. Mengingat penelitian merupakan penelitian lapangan dengan melibatkan beberapa unsur, maka informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	Tidak sekolah	-	-
2	SD	-	-
3	SMP	1	10%
4	SMA	5	50%
5	D1-D3	1	10%
6	D4-S1	1	10%
7	S2	2	20%
8	S3	-	-
Jumlah		10	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMP sebanyak 1 orang atau 10%, SMA sebanyak 5 orang atau 50%, diploma sebanyak 1 orang atau 10%, sarjanasebanyak 1 orang atau 10%, dan tingkat pendidikan pascasarjana

berjumlah 2 orang atau 20%. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa Informan paling banyak adalah SMA yaitu sebanyak 5orang.

3. Umur Informan

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi faktor penting untuk mempertimbangkan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, dan juga mempengaruhi pola pikir dan standart kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21 – 30	2	20%
2.	31 – 40	3	30%
3.	41 – 50	5	50%
Jumlah		10	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 2 orang atau 20%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 3 orang atau 30%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 5 orang atau 50%,Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat ketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini

relative sudah dewasa yaitu 41-50 orang yang di jadikan informan sebanyak 5 orang atau 50% sudah berumur 41-50 tahun.

B. Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Kampar.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, secara etimologis kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Menurut bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa inggris “evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut penegetian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Banyak sekali pendapat para ahli tentang pengertian evaluasi diantaranya:

Menurut Arikunto (2003) mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan.

Selanjutnya menurut Willam N. Dunn (2003: 608-610) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (Rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Kebijakan member informasi ythat valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan, telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Untuk menilai suatu kesuksesan suatu kebijakan, maka perlu dikembangkan beberpa indikator. Adapun indikator keberhasilan yang dikembangkan dalam kutipan (Nugroho, 2009:537)

1. Efektifitas : menyangkut kesuksesan yan diperoleh sesuai dengan keiinginan;
2. Efisiensi : menyangkut banyaknya upaya ayang dilakukan agara tercapainya tujuan yang diinginkan;
3. Kecukupan : menyangkut tingkat kesuksesan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada;
4. Perataan : berkenaan dengan apakah biaya menfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kolompok yang berbeda;
5. Responsivitas : menyangkut penilaian kebijakan yang sesuai dengan keperluan ataupun selera sekumpulan anggota tertentu;
6. Ketetapan ; menyangkut penilaian kesuksesan memiliki tata nilai ataupun sesuai dengan kebutuhan;

Selanjutnya dalam kutipan (Winarno, 2012) evaluasi dimaksudkan perkiraan, penyerahan jumlah, serta penilaian. Evaluasi menyangkut pembuatan informasi meliputi tata nilai ataupun keuntungan dari suatu upaya yang dilakukan. Evaluasi yang menghasilkan informasi yang benar menyangkut kualitas kerja, sesuai kebutuhan, nilai, serta peluang yang dapat dihasilkan dari tungkah laku publik.

Untuk melihat Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Kampar. maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

1. Efektifitas

Efektifitas adalah sebuah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihanlainnya, efektifitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan tujuua yang telah di tentukan ataupun efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah di tetapkan,jika hasil kegiatan atau program semakin dekat dengan sasaran maka makin tinggi efektifitasnya ,Othenk(2008;7) kemudian berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Kampar pada indikator efektifitas mengedepankan berkaitan dengan adanya sosialisas kepada masyarakat terhadap program yang di jalankan, dan juga efektifnya pembinaan yang tentang Sanggar Kegiatan Belajar ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

a. Adanya sosialisasi kepada Masyarakat

Adanya sosialisasi kepada masyarakat dalam penelitian ini dimaksud sebagai pemberian sosialisasi dari pihak pemerintah yang menjalankan program ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar kepada UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar, Sosialisasi ini diberikan kepada masyarakat Khususnya masyarakat Kabupaten Kampar yang ikut ke dalam Program Sanggar Kegiatan Belajar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal berkaitan dengan SKB ini agar mengerti dan bisa mengikuti program ini dengan baik. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksanaan

Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar hari Senin, 2 Maret 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Kami selaku pihak yang menyelenggarakan Program SKB ini sebelumnya kami sudah melakukan sosialisasi di beberapa daerah di kabupaten kampar terkait dengan program sanggar Kegiatan Belajar ini ,walaupun kami akui juga belum semua secara merata kami lakukan sosialisasi di daerah kabupaten kampar ini tetepi saya liat respon masyarakat positif dalam menanggapi program ini karena di kabupaten kampar ini sendiri masih banyak anak putus sekolah karena berbagai faktor ,”

Dengan luasnya daerah Kabupaten Kampar sehingga sosialisasi yang di berikan belum cukup mereka yang dilakukan oleh Pihak penyelenggara program ini, selain itu Hasil Wawancara dengan Andri, salah satu warga belajar di SKB Kabupaten Kampar ini mengatakan :

“kami sebelumnya telah diberikan sosialisasi oleh pemerintah berkaitan dengan program yang mereka jalankan ini, saya sebagai salah satu warga belajar di Sanggar Kegiatan Belajar ini sangat terbantu dengan adanya sosialisasi kami jadi mengerti dan bisa mudah ikut bergabung program ini,yang sebelumnya kami tidak mengetahui adanya program sanggar belajar ini, tetapi saya juga tidak mengetahui apakah daerah lain juga mendapatkan sosialisasi seperti kami”

Dari Hasil Penelitian diatas untuk indikator adanya sosialisasi , memang benar bahwa Pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi sebelumnya di beberapa daerah di kabupaten kampar terkait dengan program sanggar kegiatan belajar ini dan respon masyarakat juga positif namun dalam hal ini sosialisasi yang diberikan belum lah merata di daerah kabupaten kampar ini.

Berdasarkan Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan bahwa pihak UPT Sanggar Kegiatan Belajar telah melakukan sosialisasi

sebelumnya di beberapa daerah di kabupaten kampar ini namun sosialisasi yang diberikan belum sepenuhnya merata untuk setiap daerah yang ada.

b. Adanya Pembinaan tentang Sanggar Kegiatan Belajar

Adanya Pembinaan tentang Sanggar Kegiatan Belajar dimaksud sebagai suatu kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kampar Melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar yang bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada pendidik dan tenaga pendidikan nonformal untuk menciptakan pamong belajar yang profesional agar program SKB ini dapat berjalan dengan baik karena memiliki tenaga pengajar yang berkompeten. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar hari Senin, 2 Maret 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“ terkait dengan pembinaan tentang sanggar kegiatan belajar ini, kami sebelum telah melakukan beberapa pembinaan kepada tenaga pendidik kami sebagai pamong belajar mereka harus mempunyai kemampuan yang berkompeten yang tidak kalah dengan tenaga pendidik pendidikan formal agar program SKB ini dapat berjalan dengan tujuan karena pamong belajar yang berkompeten namun dengan keterbatasan anggaran pembinaan ini tidak rutin dilakukan, dengan warga belajar yang terus bertambah secara otomatis pamong belajar juga harus ditambah dan juga harus dilakukan pembinaan lagi agar kualitas pamong belajarnya sama ”

Dengan adanya pembinaan kepada pamong belajar ini memang dituntut untuk profesional agar dapat menjalankan tujuan dan memberikan kebutuhan pendidikan kepada warga belajar di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten kampar selain itu Hasil Wawancara dengan Andri, salah satu warga belajar di SKB Kabupaten Kampar ini mengatakan :

“kami sebagai warga belajar SKB ini memang sangat membutuhkan pamong belajar yang berkualitas agar terciptanya mutu pendidikan non formal yang baik di SKB ini, karena disaat kami tidak bisa merasakan pendidikan secara formal dengan tenaga pendidik yang baik disini lah kami mengharapkan pendidikan non formal namun dengan mutu pendidikan yang tidak kalah baik dengan pendidikan Formal”

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait dengan indikator adanya pembinaan tentang Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kampar ini bahwa Pemerintah terkait melalui UPTD Sanggar Kegiatan Belajar di Kampar sebelumnya mereka telah memberikan pembinaan kepada tenaga tenaga pengajar di SBK ini dan berharap dengan adanya pembinaan akan meningkatkan mutu pendidik yang baik dan menjadi pamong belajar yang berkompeten demi tercapainya tujuan dari SKB ini.

Berdasarkan Hasil Observasi peneliti di lapangan peneliti melihat bahwa kualitas dari Pamong Belajar itu sendiri belum sepenuhnya maksimal dan memang harus terus sering di lakukan pembinaan agar semakin berkompeten dan dapat memenuhi kebutuhan dari Warga belajar yang ada di SKB ini.

2. Efisiensi

Efektifitas adalah suatu pencapaian tujuan secara tepat atau melimih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dan efektifitas bisa di artikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah di tentukan, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Efektifitas adalah guna,keaktifan,serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tuhas dengan tujuan yang ingin di capai, kemudian berkaitan

dengan permasalahan yang di angkat peneliti berkaitan dengan Evaluasi pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kampar ini efesiensi ini berkaitan dengan adanya Penyuluhan berkaitan dengan Program Sanggar Kegiatan Belajar ini dan juga adanya kerjasama antara masyarakat dengan pihak pemerintah. dan juga untuk melihat indikator Efesiensi dalam pelaksanaan Sanggar Kegiatan Belajar ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indikator di atas , yaitu :

a. Adanya Penyuluhan dalam Pelaksanaan Sanggar Kegiatan Belajar

Penyuluhan ini dimaksud sebagai sebuah kegiatan awal yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menjalankan Program SKB di kabupaten Kampar ini, penyuluhan ini diberikan kepada beberapa daerah di kabupaten kampar yang bertujuan memberikan pengetahuan terkait Program ini seperti Pelaksanaannya dan Tujuan dari Program ini, penyuluhan ini diberikan ke beberapada daerah yang memiliki tingkat anak putus sekolah yang tinggi. Indikator ini salah satu indikator paling penting dalam melaksanakan sebuah program kerana ini akan memberikan informasi awal kepada pihak yang menjadi terget dari program ini . Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar hari Senin, 2 Maret 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Ya, terkait dengan masalah penyuluhan kami dari awal telah melakukan penyuluhan ke beberapa daerah dikabupaten kampar ini, tujuan kami pasti memberikan pemahaman awal terkait program yang di buat oleh pemerintah terkait dengan pendidikan non formal seperti SKB ini, namun dengan keterbatasan anggaran yang kami miliki sehingga penyuluhan ini tidak sepenuhnya merata yang kita tahu bahwa kabupaten kampar ini sangat luas dan terdapat beberapa titik daerah yang lumayan jauh dari pusat kota itu salah satu penyebab tidak

meratanya penyuluhan yang di berikan”

Dengan adanya penyuluhan yang di berikan oleh pihak terkait ini sangat membantu bagi warga kampar khususnya bagi mereka yang putus sekolah karena Program Sanggar kegiatan Belajar ini salah satu tujuannya untuk anak putus sekolah melanjutkan pendidikan di SKB ini Hasil Wawancara dengan Ari, salah satu warga Salo di Kabupaten Kampar ini mengatakan :

“Kami warga Salo memang telah mendapatkan Penyuluhan sebelumnya oleh Pihak pemerintah terkait dengan ingin di laksanakan Program Sanggar Kegiatan Belajar ini, langkah awal ini sangat membantu menurut saya, sehingga kami sebagai warga mengetahui apa programnya dan diperuntukan untuk siapa. Dan juga saya mengharapkan penyuluhan ini tidak saja di tempat kami juga harus merata di beberapa daerah lain lagi di Kampar ini karna saya rasa masih banyak daerah lain di Kabupaten Kampar ini yang sangat membutuhkan Program ini”

Sesuai dengan hasil wawancara di atas kita ketahui bahwa memang telah dilakukannya penyuluhan yang di berikan oleh pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar ini , dan respon masyarakat juga positif dalam menanggapi penyuluhan yang diberikan oleh pihak Pemerintah.

Berdasarkan Hasil Observasi yang dilakukan Oleh Peneliti dilapangan bahwa penyuluhan memang benar telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kampar terkait dengan Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar ini tetapi dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga penyuluhan yang di berikan tidak seluruhnya merata sehingga ada beberapa daerah yang tidak mendapatkan penyuluhan terkait dengan Program SKB ini.

b. Adanya kerjasama dengan Masyarakat

Kerja sama dengan Masyarakat setepamat merupakan point penting dalam penyelenggaraan sebuah Program dengan adanya kerjasama itu di artikan sebagai dukungan oleh kalangan masyarakat dalam mensukseskan sebuah kegiatan atau program yang ingin dijalankan ini salah satu hal yang penting juga tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat maka program yang akan di jalankan juga tidak akan berjalan dengan baik sama halnya terkait dengan Pelaksanaan Program Kegiatan Belajar di Kabupaten Kampar ini harus ada kerja sama dengan masyarakat untuk menunjang terwujudnya program Sanggar Kegiatan Belajar ini Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar hari Senin, 2 Maret 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“peran masyarakat memang sangat penting dalam pelaksanaan sebuah program, tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari kalangan masyarakat sebuah program tidak akan berjalan dengan baik dan dalam pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan belajar ini sangat didukung oleh masyarakat setempat ,dimana masyarakat berkerjasama dengan pemerintah dalam hal pemberian informasi tentang program ini, namun menurut saya karena ada beberapa daerah yang belum kami datangkan dalam proses sosialisasi saya merasa masih ada juga masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam program ini, masih ada rasa ketidakpedulian itu masih ada ,dan sini lah peran kami untuk merangkul pihak masyarakat agar dapat turut membantu dan ikut kerjasama dalam melaksanakan program ini”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas diketahui bahwa telah Pemerintah telah bekerjasama dengan masyarakat di beberapa daerah dan juga pemerintah menilai masih ada juga yang belum ikut berpartisipasi. ini Hasil Wawancara

dengan Ari, salah satu warga Salo di Kabupaten Kampar ini mengatakan :

“Pemerintah sebelumnya telah hadir dan meminta agar kami selaku masyarakat ikut turut bekerjasama dalam memsukkseskan program yang di jalankan ini dan selaku masyarakat dengan senang hati pasti akan berkerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan program ini tetapi saya juga ragu dengan masyarakat daerah lain terkait dengan keikutsertaan mereka dalam memsusksekan program ini karena pemerintah saja belum mensosialisasikan kedaerah terpencil tersebut,sehingga masyarakat tidak mengetahui akan program ini”

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan salah satu warga di salo Kabupaten Kampar bahwa masyarakat disana dengan senang hati ikut bekerja sama dengan pihak pemerintah dalam menjalankan Program SKB ini dan Berdasarkan Hasil Observasi peneliti dilapangan mengetahui bahwa sebagian warga ikut turut bekerjasama dalam Pelaksanaan Program SKB ini dan masih ada juga masyarkat yang kurang peduli atau apatis dalam program ini karena Pihak pemerintah sendiri belum menjangkau daerah daerah lain sehingga mereka mengerti dan ikut bekerja sama dengan pemerintah.

3. Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat Efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbhkan adanya masalah.kreteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara antara alternatif kebijakan dan asil yang di harapkan, Dunn, dalam Rian Nugroho,(2009: 536) berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti berkaitan denga Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam menanggulangi Pendidikan anak putus sekolah di Kabupaten Kampar , indikator Kecukupan berkaitan dengan

masih adanya masyarakat yang tertinggal dalam Program sanggar Kegiatan Belajar dan juga tidak sebandingnya penyediaan tenaga penyuluhan Sanggar Kegiatan Belajar dengan jumlah masyarakat yang ada. dan juga untuk melihat indikator Efisiensi dalam pelaksanaan Sanggar Kegiatan Belajar ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

- a. Masih adanya Masyarakat yang tertinggal dalam Program Sanggar Kegiatan Belajar

Ketertinggalan dalam Program Sanggar Kegiatan Belajar ini diartikan dalam pelaksanaan Program ini ada beberapa Warga belajar yang tidak secara rutin mengikuti program SKB ini dikarenakan beberapa faktor seperti masih ada pemikiran orang tua yang tidak mementingkan pendidikan baik secara formal maupun nonformal dan juga di karenakan dalam pelaksanaan program SKB di Kabupaen Kampar ini Hanya terdapat satu SKB jadi membuat beberapa warga belajar yang tidak efektif mengikutinya di karena jarak atau lokasi yang lumayan jauh dari tempat tinggalnya, dan hal ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah setempat yang menjalankan program ini. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar hari Senin,2 Maret 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Ya, sampai saat ini masih ada warga belajar yang mengalami ketertinggalan dalam proses belajar di sanggar kegiatan Belajar ini, seperti yang kita ketahui masih banyak yang menganggap pedidikan itu tidak penting sehingga mereka tidak secara rutin dan efektif mengikuti program yang telah kami jalani ini dan juga karena lokasi yang berjauhan dengan tempat tinggal mereka juga yang menjadi salah satu permasalahan utama dalam penyelenggaraan Program ini”

Dapat Kita ketahui melalui wawancara di atas bahwa memang masih ada warga belajar yang mengalami ketertinggalan dalam program sanggar kegiatan belajar ini karena beberapa faktor yang telah di jelaskan diatas ini Hasil Wawancara salah satu warga belajar di Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kampar ini mengatakan :

“memang benar karena jauhnya lokasi tempat tinggal mereka dengan SKB ini yang membuat mereka jadi malas ikut dalam program ini, dan sebenarnya warga belajar di SKB ni kebanyakan dari warga sekitar Sanggar Kegiatan Belajar ini aja”

Berdasarkan Hasil Wawancara di atas mereka mengakui bahwa lokasi menjadi permasalahan utama dalam penyelenggaraan Program Kegiatan Sanggar Belajar ini dan berdasarkan hasil Observasi Peneliti di lapangan mengetahui bahwa benar kebanyakan warga belajar dari Sanggar Kegiatan Belajar di kabupaten Kampar ini dari warga sekitaran tempat SKB ini berlangsung, dan masyarakat yang berjauhan dari SKB ini kurang berpartisipasi dalam program ini, dengan banyaknya anak putus sekolah harus di sertai juga sarana SKB yang mencukupi.

- b. Tidak sebandingnya penyediaan tenaga penyuluhan Sanggar Kegiatan Belajar dengan jumlah masyarakat yang ada.

Tenaga penyuluhan ini salah satu ujung tombak dalam penyelenggaraan sebuah program yang mana mereka yang akan melakukan proses penyuluhan bertemu dengan masyarakat secara langsung yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan Program yang di jalankan ini,jika dalam proses penyuluhan tidak maksimal maka program yang akan di jalankan juga turut

kurang maksimal dalam penelitian ini berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam menanggulangi Pendidikan Anak Putus sekolah di Kabupaten Kampar Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar hari Senin, 2 Maret 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Tenaga Penyuluh juga salah satu kekurangan kami dalam pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar ini, seperti di awal karena keterbatasan Anggaran ini yang membuat kami kurang maksimal dalam hal penyuluhan yang mana Kabupaten Kampar ini Cukup luas kita ketahui dengan anggaran yang terbatas menghambat proses penyuluhan tersebut, dengan anggaran yang ada kami Cuma terdapat 7 tenaga penyuluh dengan banyaknya masyarakat dan daerah yang kami anggap terdapat banyak anak putus sekolah ini sangat tidak memadai”

Dari hasil wawancara di atas kita ketahui bahwa tenaga penyuluh dalam Program Sanggar Kegiatan Belajar ini masih kurang mencukupi hanya ada 7 orang tenaga penyuluh di kabupaten kampar untuk melakukan penyuluhan di beberapa daerah dengan keterbatasan anggaran ini sangat tidak memadai. Wawancara salah satu warga yang tidak mendapatkan penyuluhan ini mengatakan :

“kami mengetahui Program SKB itu tapi kami tidak mengetahui bagaimana cara untuk kami bisa bergabung dengan program itu ya dikarenakan di tempat kami tidak ada penyuluhan yang di lakukan oleh pemerintah sehingga kami keterbatasan informasi tentang program ini, ini salah satu penyebab kami banyak tidak ikut berpartisipasi dalam program SKB ini “

Dari Hasil wawancara diatas kita ketahui bahwa terkait dengan tidak sebandingnya tenaga penyuluh dengan jumlah masyarakat yang ada memang

benar tenaga penyuluh tersebut masih kurang . Berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa karena keterbatasan anggaran yang ada menyebabkan tenaga penyuluh kurang.

4. Pemerataan

Berkaitan dengan Evaluasi Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam menanggulangi pendidikan anak putus sekolah di Kabupaten Kampar ini pemerataan diartikan sebagai adanya kelengkapan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program atau pun penyediaan kelengkapan dalam Proses pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kampar, dan dalam Penelitian ini pada Indikator Pemerataan dapat dibagi atas dua sub indikator antara lain : adanya tim pengawas dalam pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dan adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar, dari indikator Pemerataan diatas dalam pelaksanaan Sanggar Kegiatan Belajar ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indikator di atas , yaitu :

- a. Adanya Tim pengawas dalam Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar

Adanya sebuah pengawasan dalam sebuah program kegiatan itu suatu keharusan, pengawasan yang di lakukan bertujuan agar sebuah Program dapat di jalankan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak keluar dari cita cita dan tujuan dari sebuah Program dalam hal ini berkaitan dengan Program Sanggar Kegiatan Belajar Di Kabupaten Kampar Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar hari Senin, 1 Juni 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Tim pengawas itu pasti selalu ada ya, namanya kita menjalankan sebuah Program pemerintah pengawasan itu pasti di lakukan, agar kami selaku penyelenggara Program Sanggar Kegiatan belajar dapat bekerja sesuai dengan SOP dan dan tidak keluar dari aturan yang telah di tetapkan”

Dari hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar kita ketahui bahwa pengawasan terus dilakukan agar penyelenggaraan kegiatan dapat bekerja sesuai dengan aturan dan ketetapan yang telah di tentukan, Wawancara salah satu warga belajar sanggar kegiatan belajar Kabupaten Kampar ini mengatakan :

“untuk pengawasan dalam pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan belajar ini ya kami selaku masyarakat tidak mengerti dalam hal itu. Seperti apa bentuk pengawasannya juga kami tidak mengetahui “

Dari hasil wawancara terhadap warga belajar Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kampar ini kita ketahui bahwa mereka tidak mengetahui apakah ada pengawasan yang dilakukan terhadap program yang di jalankan ini ,dan bentuk pengawasan apa yang dilakukan pihak warga belajar tidak mengetahuinya dan berdasarkan hasil Observasi peneliti di lapangan tidak melihat seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengawas Program Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kampar.

B. Adanya sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar.

Sarana dan Prasarana dalam penelitian ini berkaitan sektor penunjang dalam pelaksanaan kegiatan program sanggar kegiatan belajar di Kabupaten Kampar seperti Ruang belajar perlengkapan belajar seperti meja ,kursi dll, yang mana hal ini sangat penting dalam pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kampar Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar hari Senin,1 Juni 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“untuk Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan Program sanggar Kegiatan Belajar ini seperti yang bisa kita ketahui secara langsung kami memiliki 7 ruang kelas namun kondisinya saat ini memang harus ada yang beberapa harus di renovasi ,kembali lagi terkait dengan anggaran yang membuat belum terlaksananya renovasi ruangan tersebut”

Dari hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar kita ketahui bahwa berkaitan dengan Adanya sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar. Untuk sarana dan prasaran seperti yang dijelaskan di atas terkait dengan Ruang kelas belajar memerlukan renovasi namun itu belum terlaksana karena keterbatasan anggaran. Wawancara salah satu warga belajar sanggaar kegiatan belajar Kabupaten Kampar ini mengatakan :

“iya menurut saya ruangan kelas ini harus di renovasi karena ada beberapa ruang kelas yang bocor itu bisa mengganggu proses belajar mengajar

kami kemudian untuk kursi ada yang rusak juga kami harap pemerintah bisa cepat memperbaiki sarana dan prasarana di Sanggar Kegiatan Belajar ini.

Dari hasil wawancara terhadap warga belajar Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kampar ini kita ketahui bahwa untuk sarana dan prasarana di Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kampar ini harus di renovasi karena ada beberapa ruang kelas yang rusak, berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa memang benar masih ada beberapa ruang kelas yang memerlukan perbaikan.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas pelayanan, serta mengembangkan dalam berbagai program pelayanan, responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan, Agus Dwiyanto (2006:148). Berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti berkaitan dengan Evaluasi Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam Menanggulangi Pendidikan anak putus sekolah di Kabupaten Kampar terkait dengan Indikator Responsivitas ini terdapat dua Sub Indikatornya yaitu : Pelaksanaan Program sanggar Kegiatan Belajar berjalan dengan baik dan Banyaknya pihak yang mengikuti aturan. ,dari indikator Pemerataan diataas dalam pelaksanaan Sanggar Kegiatan Belajar ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

- a. Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar berjalan dengan baik

Dalam sub indikator di atas dimaksud sebagai dalam menjalankan sebuah Program lebih tepatnya berkaitan dengan Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan

belajar di Kabupaten Kampar ini telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuannya, Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar hari Senin,1 Juni 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Berbicara berkaitan dengan apakah program ini sudah berjalan dengan baik ya, menurut saya hingga saat ini program ini sudah berjalan sesuai dengan aturan bisa kita lihat dari struktur organisasinya yang jelas, tujuan dan sasaran nya juga jelas tapi ya walaupun sudah berjalan dengan baik tapi masih ada lah sedikit kekurangan lah seperti tenaga penyuluhnya dan beberapa sarana prasarana belajar yang kurang yang mana ini akan menjadi PR penting bagi kami selalu penyelenggara program SKB ini”

Berdasarkan Hasil wawancara di atas kita ketahui bahwasannya program ini sudah berjalan sesuai dengan aturan namun masih ada kekurangan kekurangan yang harus cepat di selesaikan oleh pihak pemerintah agar Program Sanggar Kegiatan Belajar ini benar benar baik dan dapat menyelesaikan masalah masalah pendidikan anak putus sekolah ini. Wawancara salah satu warga belajar sanggaar kegiatan belajar Kabupaten Kampar ini mengatakan :

“saya sebagai warga belajar di Sanggar Kegiatan Belajar ini merasa Program pemerintah ini belum maksimal ya, karena masih ada sarana dalam proses belajar di SKB ini masih kurang, kayak juga gedung belajar yang menurut saya masih kurang tidak sesuai dengan jumlah warga belajar yang terus meningkat”

Berdasarkan Hasil Wawancara diatas berkaitan dengan Pelaksanaa Program Sanggar Kegiatan Belajar telah berjalan dengan baik, dalam prosesnya Program ini sudah lah berjalan sesuai dengan aturan yang ada tetapi kekurangan kekurangan seperti tenaga penyuluh dan sarana serta prasarana belajar masih juga

harus di perhatikan oleh pemerintah selaku pihak penyelengaran Program Sanggar Kegiatan Belajar ini, berdasarkan hasil Observasi Peneliti di lapangan melihat prgoram ini memang benar telah berajalan namun masih banyak yang harus di perbaiki oleh pemerintah selaku penyelenggara Program Sanggar Kegiatan Belajar ini seperti saarana dan prasarana seperti gebung yang harus di renovasi serta ruangan yang terbatas tidak sesuai dengan jumlah warga belajar yang terus meningkat.

6. Ketepatan

Menurut Poerwadarminto (1979:1055), Ketepatan dapat di artikan sebagai ketelitian atau kejutan. Kemudian Menurut Mochamad Sajoto (1988;59), Ketepatan adalah kemampua dalam mengendalikan gerak gerak bebas terhadap suatu sasaran. Ketepatan merupakan faktor yang di perlukan seseorang dalam mencapai terget yang di inginkan. Berkaitan dengan masalah pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam menanggulangi anak putus sekolah di Kabupaten Kampar ini ketepatan memiliki dua sub indikator yaitu: dalam Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar ini apakah telah tepat sasaran dan apakah pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar ini telah sesuai dengan aturan yang ada dari indikator Pemerataan diataas dalam pelaksanaan Sanggar Kegiatan Belajar ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

- a. Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan sasaran yang di tuju

Menentukan sasaran dalam sebuah program itu merupakan sebuah hal yang paling penting agar tujuan dari sebuah program tersebut dapat tercapai,

berkaitan dengan Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar Dikabupaten kampar yang menjadi sasaran dalam program ini adalah anak putus sekolah baik di jenjang SD,SMP maupun SMA, Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar hari Senin,1 Juni 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Sasaran dalam Program yang kami jalankan ini sangat jelas ya , program ini diperuntukan untuk anak-anak putus sekolah dan Kurang Mampu Khususnya anak-anak yang ada di kabupaten kampar, seperti yang kita ketahui banyak faktor yang menyebabkan mereka putus sekolah yang paling utama itu faktor Ekonomi namun kami akui juga bahwa belum sepenuhnya semua anak putus sekolah di kabupaten kampar ini mengikuti program SKB ini masih banyak dari mereka yang berfikir pendidikan itu tidak penting hanya membuang waktu mereka ,dengan hal ini kami akan terus mencoba memberikan penyuluhan secara bertahap kepada masyarakat pentingnya pendidikan itu”

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa sasaran dari Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar ini yaitu anak anak yang putus sekolah dan masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya baik di jenjang SMP atau SMA. . Wawancara Marwan salah satu warga kurang mampu di Kabupaten Kampar ini mengatakan :

“saya sebagai masyarakat kurang mampu memang sangat memerlukan program yang seperti ini ,kami yang tidakdapat melanjutkan pendidikan formal karena masalah biaya ,dengan adanya SKB ini kami bisa melanjutkan pendidikan kesetaraan kami ,seperti anak saya Cuma tamatan smp dan tidak melanjutannya karena masalah biaya setelah adanya program SKB ini anak saya bisa melanjutkan pendidikan sma melalui paket C di SKB ini”

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa sasaran dari Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar ini yaitu anak-anak yang putus sekolah dan masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya baik di jenjang SMP atau SMA. Berdasarkan Hasil Observasi Peneliti di lapangan bahwa Sasaran dalam Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar Di Kabupaten Kampar ini telah tepat sasaran yaitu di peruntukan untuk anak-anak putus sekolah dan masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan jenjang pendidikan mereka namun dalam hal ini masih juga ada masyarakat yang putus sekolah dan kurang mampu yang tidak mengikuti Program SKB ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan secara menyeluruh terkait dengan pentingnya pendidikan

- b. Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam menjalankan sebuah program haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan pemerintah terkhusus kerugian dalam Program ini sendiri berkaitan dengan Pelaksanaan Program sanggar Kegiatan Belajar ini sudah di atur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 88 tahun 2016. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar hari Senin, 1 Juni 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“ya... Benar kita dalam menjalankan sebuah program harus lah sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga dalam proses penyelenggaraa program ini kan ada juga tim pengawas yang akan mengawasi program kami dan terkait dengan Aturan dari Program Sanggar Kegiatan Belajar ini sendiri sudah di atur

dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar”

Berdasarkan hasil wawancara di atas kita ketahui bahwa Pelaksanaan Program sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten kampar ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan Perbub Kampar Nomor 88 tahun 2016. Wawancara salah satu warga belajar di Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kampar ini mengatakan :

“Kami tidak tahu mengenai aturan tentang program ini ,kami selaku warga belajar hanya mengikut saja dari proram SKB ini apakah ini telah sesuai dengan aturannya atau tidak kami tidak mengetahui, mungkin sebelumnya sudah di sosialisasikan aturan ini tatapi saya sebagai warga belajar di SKB ini tidak mengetahui secara jelas lah masalah apakah program ini sudah berjalan sesuai dengan aturan , namun hingga saat ini saya rasa program ini sudah berjalan baik ya..”

Berdasarkan Hasil wawancara di atas terkait dengan Pelaksanaan Program Sangar Kegiatan Belajar ini telah sesuai dengan aturan, di ketahui bahwa pihak penyelenggara mengatakan bahwa program ini sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Bupati kampar Nomor 88 tahun 2016 ini.

Berdasarkan hasil Observasi Peneliti dilapangan melihat bahwasannya program ini telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dari pihak warga belajar juga merasakan program ini sudah berjalan baik walaupun mereka tidak mengetahui secara jelas terkait dengan aturan aturan dalam Program Sanggar Kegiatan Belajar Di Kabupaten Kampar.

C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kampar

Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kampar menemui beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya, adapun hambatan tersebut antara lain :

1. Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan secara merata ke beberapa daerah oleh Pemerintah Kabupaten Kampar terkait dengan Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar.
2. Kurangnya anggaran untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat Kabupaten Kampar secara merata sehingga beberapa daerah tidak mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang mana ada beberapa masyarakat yang menganggap pendidikan tidak penting
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Program sanggar Kegiatan Belajar seperti Ruang belajar dalam kondisi rusak
5. tenaga penyuluh yang tidak sebanding dengan banyaknya warga belajar di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kamapar.
6. Masih ada warga belajar yang tidak mengerti terkait dengan aturan di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab V hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori dalam penelitian ini, yakni teori kinerja dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar pada Indikator Efektifitas masih kurang dikarenakan sosialisasi yang di berikan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Kampar tidak merata sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui akan program ini.
2. Pada Indikator Efisiensi terkait dengan pelaksanaan program SKB ini Kurang maksimal juga berkaitan dengan penyuluhan yang diberikan kurang merata dikarenakan anggaran yang terbatas
3. Pada Indikator Kecukupan berkaitan dengan masih adanya masyarakat yang tertinggalan dalam pelaksanaan program sanggar kegiatan belajar ini dikarenakan pola pikir masyarakat yang masih tidak mementingkan pendidikan.
4. Pada Indikator Pemerataan ini berkaitan dengan adanya pengawasan dalam pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar.
5. Pada Indikator Resposifitas ini berkaitan dengan Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar ini, pada Indikator ini berkaitan dengan Kurangnya sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan Program ini seperti

6. Ruang Belajar yang kurang serta meja dan kursi yang perlu di tambah.
7. Pada Indikator Ketepatan ini berkaitan dengan dengan Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar apakah tepat sasaran dalam program ini telah di peruntukan untuk masyarakat khususnya warga di Kabupaten Kampar yang putus sekolah dikarenakan beberapafaktor seperti ekononi.

B. Saran

1. Disarankan Kepada UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar terkait dengan sosialisasi yang di berikan harus lebih merata agar warga yang putus sekolah di beberapa daerah yang belum mengetahui program ini dapat ikut bergabung kedalam SKB Kabupaten Kampar.
2. Disarankan untuk UPT Sanggar Kegiatan Belajar agar rutin dalam memberikan penyuluhan kebeberapa daerah yang adadi Kabupaten Kampar terkait dengan pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar.
3. Disarankan untuk UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar agar memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih tidak mementingkan Pendidikan
4. Disarankan untuk UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar untuk lebih memerhatikan Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Program sanggar kegiatan belajar seperti merenovasi Ruang belajar serta menambah Kursi dan meja belajar.
5. Disarankan untuk UPT Sanggar Kegiatan Belajar untuk menambah jumbuh pamong belajar kerana jumlah warga belajar yang terus meningkat.

6. Disarankan untuk UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar untuk menjelaskan aturan aturan yang ada di dalam SKB Kabupaten Kampar agar Program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifin, Anwar, 2011. *Komunikasi Politik (Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik)*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, S, 2003. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Edisi Revisi*, Bumi Aksara: Yogyakarta.
- Budiarjo, Mariam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka: Jakarta.
- Budi, Winarno, 2012. *Kebijakan Publik*, CAPS: Yogyakarta.
- C.S.T Kansil, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dunn, William N, 2003. *Pangantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gaja Mada University Press.
- Komalasari, Kokom, 2011. *Pembelajaran Konseptual Konsep dan Aplikasi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- M, Nazir, 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia.
- Marzuki, Saleh, 2012. *Pendidikan Non Formal Dimensi Dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, dan Andralogi*, Bandung: PT Remaja Rosda Kerya.
- Nurdin, Usman, 2012. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung: CV Sinar Baru.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru, Jilid 1*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2008. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru 1*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Musanef, 2002. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Matutu, Musptamin Daeng dkk, 2004. *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasi Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Presss
- Ridwan, 2004. *Belajar Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Penelitan Pemula*, Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana, 2008. *Manajemen Pemerintahan*: PT Parca.

Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama: Bandung.

Syaukani, H,R, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

Muhammad Adil Arnady, 2008. Evaluasi Progama Kecakapan Hidup Di Sanggar Kegiatan Belajar. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Masyarakat*. Vol 3 No 1, Hal 60-74 Tahun 2016.

Melati Indri Hapsari, 2008. Pengembangan Dan Peningkatan Kinerja Pemong Belajar Program sanggar Kegiatan Belajar. *Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF*, Vol 3 No 2 Tahun 2008.

Ika Rizqi Meil dan Ibnu Syamsi, 2015. Evaluasi Program Pelatihan In- House Training Pemebelajaran Paket C Di Sanggar Kegiatan belajar Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol 2 No 2, Hal 156-174 Tahun 2015.

Dokumentasi:

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Mengenai Penyelenggara Pendidikan Non Formal.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ahli Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 023/O/1997 Tentang Tugas Pokok Sanggar Kegiatan Belajar.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar